



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA MITIGASI RISIKO BENCANA SATUAN RUANO STRATEGIS
PANTAI SELATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, diperlukan rencana penanganan risiko bencana yang komprehensif dan terintegrasi;

b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul sekitar kawasan satuan ruang strategis pantai selatan dari ancaman, risiko, dan dampak dari bencana, perlu dilakukan upaya perencanaan mitigasi bencana;

c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan mitigasi risiko bencana satuan ruang strategis pantai selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA MITIGASI
RISIKO BENCANA SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI
SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
3. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan yang selanjutnya disebut SRS PANSELA adalah satuan ruang strategis Kasultanan pada tanah bukan keprabon yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
RENCANA MITIGASI RISIKO BENCANA

Pasal 2

Rencana Mitigasi Risiko Bencana SRS PANSELA tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai:

- a. pedoman dan rencana aksi untuk mewujudkan penanggulangan Bencana dalam pembangunan dan tata ruang; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Mitigasi Risiko Bencana SRS PANSELA tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBENCANAAN WILAYAH

BAB III : TINJAUAN KEBIJAKAN

BAB IV : ANALISIS SITUASI DAN STRATEGI

BAB V : MATRIKS AKSI MITIGASI

BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VII : PENUTUP

- (2) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko Bencana SRS PANSELA tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

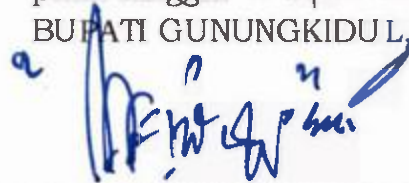
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 10.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA MITIGASI RISIKO BENCANA
SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SELATAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta memberikan kewenangan secara otonom kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur lima kewenangan secara otonom. Hak pengaturan tata ruang secara otonom selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomot 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Kadipaten. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk keistimewaan tata ruang diwujudkan dengan menetapkan 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Terdapat 3(tiga) satuan ruang strategis yang berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu SRS Sokoliman, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Pantai Selatan Gunungkidul. SRS Pantai Selatan Gunungkidul termasuk dalam satuan ruang strategis Kasultanan pada tanah bukan keprabon. SRS Pantai Selatan Gunungkidul memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan yang sangat potensial khususnya pada sektor pariwisata dan bahari, selain itu SRS pantai selatan memiliki ekosistem yang sangat kompleks. SRS Pantai selatan Gunungkidul terletak pada zona karst selatan Jawa dan akibat adanya pengaruh aktivitas fisik yang terjadi di daratan dan di laut menyebabkan terbentuknya berbagai macam tipologi pesisir di sepanjang SRS pantai Selatan Gunungkidul.

Hasil analisis kajian risiko bencana Kabupaten Gunungkidul tahun 2022, 30 Kalurahan yang tersebar di 6 Kapenewon pada wilayah SRS Pantai Selatan Gunungkidul seluas 43.584,18 Ha memiliki beberapa risiko bencana antara lain Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi (GEA), Gempabumi, Karhutla, Kekeringan, Tanah Longsor, dan Tsunami. Selain itu wilayah laut di sepanjang kawasan pangsela juga sering terjadi gelombang tinggi yang ekstrem sehingga nelayan (KUB) tidak bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut (RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026). Tabel 1.1 menunjukkan keseluruhan kalurahan yang berada di SRS Pantai Selatan Gunungkidul memiliki risiko multi bencana dengan tingkat risiko bencana rendah hingga tinggi.

Tabel 1.1.
Tingkat Risiko Bencana di Kawasan Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	KELAS RISIKO BENCANA						
			CUACA EKSIREM	GEA	GEMPA BUMI	KARHUTLA	KEKERINGAN	TANAH LONGSOR	TSUNAMI
1	Girisubo	Balong	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2		Jepitu	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3		Jerukwudel	Sedang	-	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	-
4		Karangawen	Tinggi	-	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	-
5		Ngindur	Tinggi	-	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	-
6		Pucung	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7		Songbanyu	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
8		Tileng	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Panggang	Girikarto	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
10		Girimulyo	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
11		Girisekar	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
12		Giriwungu	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
13	Purwosari	Girasih	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
14		Gircahyo	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
15		Girijati	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
16		Giripurwo	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
17		Giritirto	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
18	Saptosari	Jetis	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
19		Kanigoro	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
20		Kepek	Tinggi	-	Sedang	-	Tinggi	Rendah	-
21		Krambilsawit	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
22		Monggol	Tinggi	-	Sedang	-	Tinggi	Rendah	-
23		Ngloro	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
24		Planjan	Tinggi	-	Sedang	-	Tinggi	Rendah	-
25	Tanjung Sari	Banjarejo	Tinggi	Rendah	Sedang	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
26		Kemadang	Tinggi	Rendah	Sedang	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
27		Ngestirejo	Tinggi	Rendah	Rendah	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
28	Tepus	Purwodadi	Tinggi	Rendah	Rendah	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
29		Sidoharjo	Tinggi	Rendah	Rendah	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
30		Tepus	Tinggi	Rendah	Rendah	-	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022

Merujuk hasil kajian tersebut, setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah SRS Pantai Selatan Gunungkidul semestinya mempertimbangkan aspek kebencanaan. Secara spesifik pembangunan infrastruktur yang tangguh dengan mempertimbangkan kondisi kebencanaan akan memberikan manfaat secara langsung terhadap berkurangnya biaya untuk pemulihan dan rekonstruksi pada saat bencana terjadi. Selain itu keberadaan infrastruktur yang tangguh juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat karena harus kehilangan mata pencahariannya atau tidak bisa bekerja akibat infrastruktur yang hancur.

Pelajaran berharga saat terjadi gempa bumi pada tahun 2006, Provinsi DI Yogyakarta mengalami kehilangan *Gross Domestic Product* (GDP) hingga 30% sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memulihkan kondisi perekonomian (Sri Mulyani, 2018). Nilai tersebut tidak termasuk dampak langsung seperti kerusakan rumah, bangunan komersial dan publik, kendaraan, infrastruktur (termasuk jalan dan utilitas umum), lahan pertanian, area rekreasi, dan hutan.

Upaya penanggulangan terhadap bencana yang terencana dengan baik sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun komunitas. Salah satu fase dalam penanggulangan bencana yang perlu untuk ditingkatkan adalah pada tahap pra bencana khususnya pada kegiatan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana sehingga jumlah kerugian dapat dikurangi. Kegiatan mitigasi bencana merupakan wujud nyata dari Investasi bencana yang sejalan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 huruf 5 dan huruf 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (SFDRR) menjelaskan, perencanaan proaktif dan investasi dalam pengurangan risiko bencana berdasarkan penilaian risiko yang tepat, dapat menghemat biaya. Termasuk mencegah kerugian terkait bencana di masa depan sambil berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia dalam *Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable Infrastructure* (2019) menyebutkan berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih tangguh dapat memberikan manfaat bersih. Investasi US\$ 1 yang diinvestasikan negara berpenghasilan rendah menengah akan memberikan manfaat US\$ 4.

Berdasarkan latarbelakang tersebut BPBD Kabupaten Gunungkidul bermaksud untuk menyusun Rencana Mitigasi Risiko Bencana SRS Pantai Selatan Gunungkidul sebagai upaya untuk mewujudkan *resilience* berkelanjutan, dalam upaya mengurangi risiko bencana jangka panjang, serta memberikan dukungan terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah SRS Pantai Selatan Gunungkidul Khususnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul adalah memberikan rancangan arah dan rencana aksi untuk mewujudkan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Menyusun rumusan masalah dan isu strategis wilayah kajian;
2. Menyusun Rencana Aksi Upaya Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dilengkapi dengan waktu dan dukungan pemangku kepentingan yang diharapkan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Lingkup Wilayah, Lingkup wilayah penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul adalah Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Lingkup pekerjaan penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul meliputi:
 - a) Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data dan konsultasi kepada instansi terkait;
 - b) Penelaahan terhadap rencana tata ruang dan perumusan arahan penataan ruang yang integrasi di Kawasan Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul yang telah ada;
 - c) Mengkaji tinjauan kebijakan tata ruang, kebijakan sektoral, kebijakan lain yang saling terkait, serta kebijakan bagi Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul;
 - d) Mengkaji potensi kerusakan lingkungan dan risiko bencana alam beserta mitigasinya;

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul adalah tersusunnya naskah akademik rancangan peraturan bupati tentang penanganan risiko bencana SRS PANSELA.

E. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional hukum meliputi:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
8. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 11.Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2019 tentang rencana Tata Ruang Laut;
- 20.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
- 26.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai;
- 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 30.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
- 31.Keputusan UNESCO dalam Simposium Geoparks Network Asia-Pasifik IV di San'in Kaigan Geopark, Jepang, 15-20 September 2015;
- 32.Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 - 2029;

33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030;
34. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

F. Pengertian

Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul menggunakan beberapa istilah ataupun kelompok kata yang berkaitan dengan kebencanaan. Pengertian dari istilah maupun kelompok kata tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Ancaman Bencana selanjutnya disebut dengan Bahaya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
4. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
5. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
6. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
7. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
8. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
9. Mitigasi Non-Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

10. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
11. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
12. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
13. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologi, klimatologi, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Satuan Ruang Strategis (SRS) adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan.
20. Tingkat Ancaman adalah potensi timbulnya korban jiwa pada suatu daerah akibat terjadinya bencana.
21. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
22. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBENCANAAN WILAYAH

A. Kondisi Fisik

1. Geografis

Secara Administrasi, wilayah Perencanaan termasuk dalam Kabupaten Gunungkidul yang terletak antara 7o 4 6'- 8o 0 9' Lintang Selatan dan 110o 21' - 110o 50' Bujur Timur. Secara administratif berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah
- c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman, DI Yogyakarta

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 1.485,36 km² yang terdiri dari 18 kapanewon (Kapanewon) dan 144 desa/kelurahan dan tidak semua kapanewon tidak termasuk ke dalam wilayah perencanaan. Luas wilayah dari kapanewon yang termasuk Kawasan Strategis Pantai Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

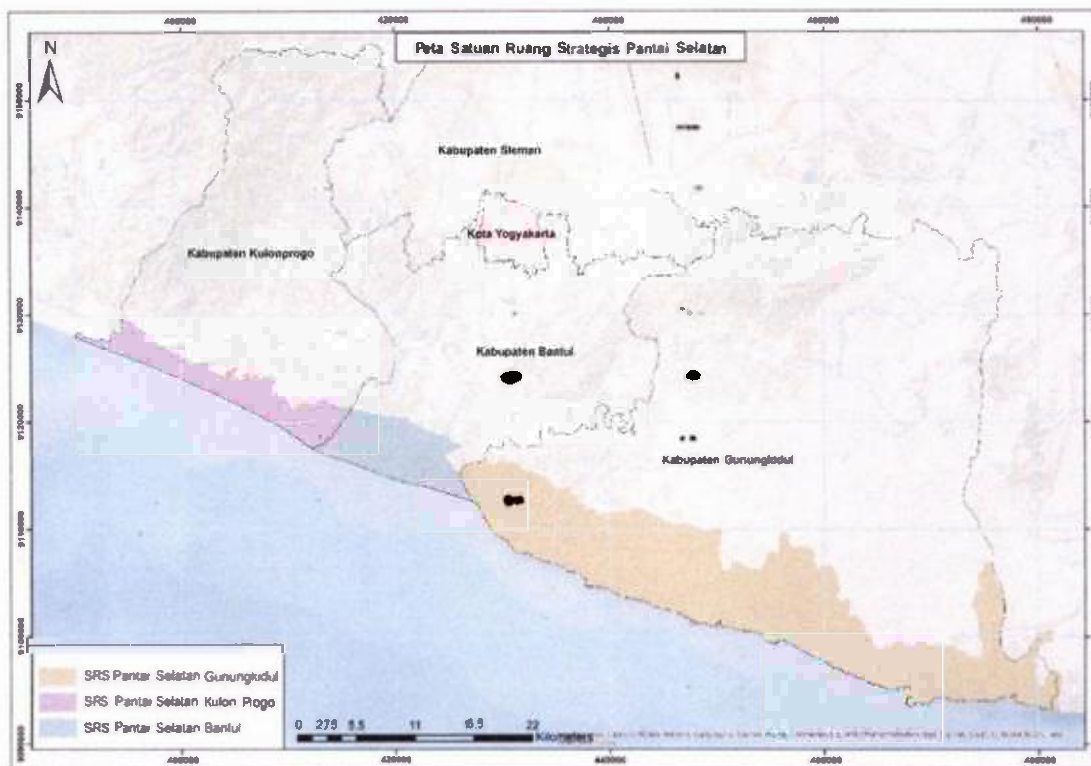
Luas Wilayah Kapanewon yang Termasuk Kawasan Strategis Pantai Selatan

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Gunungkidul (%)
1.	Purwosari	71,76	4,83
2.	Panggang	99,80	6,72
3.	Saptosari	87,83	5,91
4.	Tanjungsari	71,63	4,82
5.	Tepus	104,91	7,06
6.	Girisubo	94,57	6,37

Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2022

Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul merupakan wilayah pesisir pantai pasir dan bertebing sepanjang ± 70 Km dengan luas ± 300 ha. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul terbagi menjadi dua zona yaitu zona darat dan zona laut. Zona darat yang termasuk dalam wilayah perencanaan meliputi 31 (tiga puluh satu) kalurahan di 7 Kapanewon. Sedangkan zona laut yang termasuk wilayah SRS Pansela adalah wilayah perairan pesisir meliputi laut yang berbatasan dengan daratan berupa perairan sejauh 4 (empat) mil dari garis pasang tertinggi. Penentuan zona laut tersebut mempertimbangkan kewenangan kabupaten dalam perijinan.

Gambar 1.1. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Gunungkidul



Sumber: BAPPEDA RTRW Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030

2. Iklim

Kondisi iklim di Kabupaten Gunungkidul termasuk kepada iklim tropis yang hanya dipengaruhi oleh adanya musim penghujan dan musim kemarau. Tipe iklim secara lebih spesifik berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt Ferguson yaitu tipe iklim C yaitu agak basah. Klasifikasi didasari pada data curah hujan yang terbagi menjadi bulan basah dan bulan kering, yang mana jumlah bulan kering dan bulan basah hampir seimbang. Kondisi Iklim di Kabupaten Gunungkidul rata-rata sebagai berikut:

- Curah hujan rata-rata di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 2.898,5 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 182 hari per tahun. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober - November dan berakhir pada bulan Mei-Juni setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Maret. Bulan basah 4 - 6 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 4 - 5 bulan
- Suhu udara Kabupaten Gunungkidul 2022 untuk rata-rata harian 23,7°C, suhu minimum 21,9°C dan suhu maksimum 24,2°C.
- Kelembaban nisbi udara rata-rata di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% - 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Oktober-Desember, sedangkan terendah pada bulan Agustus.
- Kecepatan angin maksimum rata-rata di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 3,3 knot dengan tekanan udara maksimum rata-rata adalah 990,45 mbar.

3. Topografi

Topografi Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh wilayah bukit bergelombang, separuh wilayah memiliki kemiringan lebih dari 15%, yakni pada zona utara (Pegunungan Baturagung) dan zona barat, selatan dan timur (Pegunungan Sewu). Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 800 mdpl yang mana sebagian besar wilayah atau seluas 1.341,71 (90,33 %) berada pada ketinggian 100 – 500 mdpl. Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 mdpl.

Kondisi topografis Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 zona pengembangan yaitu zona utara yang disebut wilayah Batur Agung, Zona Tengah yang disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari dan zona selatan yang disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan berada pada wilayah zona selatan dengan ketinggian 0 – 300 mdpl. Material penyusun pada wilayah ini merupakan batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut dan merupakan wilayah karst yang termasuk pada Kawasan Karst Gunungsewu. Pada wilayah ini banyak dijumpai rekahan, telaga, kerucut pegunungan, goa -goa alam dan sungai bawah tanah yang mengalir. Secara lebih rinci kondisi topografis pada wilayah Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan menunjukkan kenampakan fisik di wilayah ini terdiri dari pantai, lereng, lembah, dan dataran dengan morfologi berbukit.

4. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Gunungkidul sebagai besar merupakan vulkanis lateristik dan margalite dengan batuan induknya dasit dan andesit, sehingga karena lapisan tanah yang relatif tipis di istilahkan “batu bertanah”. Struktur tanah di Kabupaten Gunungkidul dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipilahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus. Adapun jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul cukup beragam diantaranya yaitu:

- a. Latosol, dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung-gunung, tersebar di wilayah Kapanewon Patuk bagian Utara dan Selatan, Gedangsari, Ngawen, Semin bagian Timur, dan Ponjong bagian Utara;
- b. Kompleks Latosol dan Mediteran Merah, dengan batuan induk batugamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kapanewon Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Semanu bagian Selatan dan Timur, Girisubo, serta Ponjong bagian Selatan;
- c. Asosiasi Mediteran Merah dan Renzina, dengan batuan induk batugamping, bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kapanewon Ngawen bagian Selatan, Nglipar, Karangmojo bagian Barat dan Utara, Semanu bagian Barat, Wonosari bagian Timur, Utara dan Selatan, Playen bagian Barat dan Utara, serta Paliyan bagian Selatan;
- d. Grumosol Hitam, dengan batuan induk batugamping, bentuk wilayah datar sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kapanewon Playen bagian Selatan, Wonosari bagian Barat, Paliyan bagian Utara, dan Ponjong bagian Selatan;

- e. Asosiasi Latosol Merah dan Litosol, dengan bahan induk Tufan dan batuan vulkanik intermediet, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kapanewon Semin bagian Utara, Patuk bagian Selatan, dan Playen bagian Barat.

5. Hidrologi

Kondisi Hidrologi Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS tersebut meliputi DAS permukaan yang memiliki aliran sungai di permukaan tanah dan DAS bawah permukaan yang memiliki aliran sungai di bawah permukaan (banyak ditemukan di daerah karst). DAS permukaan terdapat 2 yaitu DAS Opak-Oyo dan Juwet yang mana setiap DAS terdiri dari beberapa Sub-DAS. Sungai Oyo dan Sungai Beton yang merupakan sungai permanen yang airnya mengalir sepanjang tahun. Pada wilayah ini juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin.

Sumber air permukaan berupa sungai dan mata air banyak dijumpai di wilayah bagian utara dan tengah dan juga kedalaman air tanah di bagian tengah cukup dangkal sehingga dimanfaatkan untuk sumur ladang. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan yang berada pada bagian selatan merupakan wilayah yang sulit ditemukan air permukaan, tetapi banyak sungai bawah tanah yang dapat ditemui seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta juga ditemukan telaga musiman.

Kondisi Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul yang merupakan perbukitan karst yang sebagian besar disusun oleh batu gamping dan kondisi tanah yang tipis serta dengan iklim agak basah, namun jarang ditemukannya sungai permukaan karena sebagian besar sumberdaya air berada di aliran sungai bawah tanah dan seringnya terjadi kekeringan pada saat musim kemarau maka kondisi lahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terutama di bagian selatan kurang subur sehingga budidaya pertanian di kawasan ini kurang optimal. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 90\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Pemanfaatan lahan pertanian sebagian dilakukan di sekitar goa dan telaga, hal ini mengganggu fungsi lindung.

6. Penggunaan Lahan

Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan memiliki karakter kuat sebagai konsekuensi atas Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Pantai, Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela), tower-tower operator telepon seluler (BTS), 8 lokasi tempat pelelangan ikan, Pengembangan Dermaga Perikanan Sadeng, dan lain-lain.

Total luas Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul adalah 40.979,47 ha. Dari luas lahan terbangun sebesar 2.956,93 ha di Kawasan Pantai Selatan, penggunaan lahannya meliputi permukiman, pariwisata dan perdagangan/jasa. Penggunaan lahan permukiman meliputi perumahan dan sarana-prasarana pendukungnya, yang terdiri dari perkantoran, pendidikan, kesehatan, pelayanan (fasilitas umum dan fasilitas sosial). Penggunaan lahan bagi kepentingan perdagangan terlihat pada spot-spot di sepanjang:

- a) Jalur Jalan Pansela Kapanewon Purwosari sampai Kapanewon Girisubo
- b) Jalan penghubung (di luar Jalan Pansela) antar Kapanewon Purwosari-Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo

c) Jalan Lokal (jalan desa).

Sedangkan penggunaan perkantoran dan fasilitas pelayanan umum lain tampak lebih tersebar, kecuali beberapa kantor desa dengan Puskesmas yang letaknya berdekatan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan kawasan karst sebagai kawasan lindung geologis (Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 3045 K/40/Men/2014), namun demikian tetap mendorong berbagai lapangan usaha masyarakat pada lahan sepanjang pantai selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lahan tersebut berupa lahan kering, sebagian sawah yang tersebar di daerah Kapanewon Purwosari – Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjusari, Tepus dan Girisubo. Berdasarkan konsep pengelolaan bahwa daerah tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata pantai, sehingga harus didukung dengan sistem pertanian dan pengelolaan air yang baik. Lahan pantai di Kabupaten Gunungkidul memiliki sifat agroklimat yang spesifik, yaitu solum tanah tipis di atas karst sehingga memiliki keterbatasan, kesuburan yang rendah dan ketersediaan air yang kurang. Kondisi lain adalah kecepatan angin yang cukup kuat namun kelembaban cukup tinggi sehingga evaporasi dan transpirasi cukup tinggi.

7. Sejarah Kejadian Bencana

Beberapa kejadian bencana yang pernah melanda Kabupaten Gunungkidul turut serta melanda daerah satuan ruang strategis Pantai Selatan Gunungkidul. Berdasarkan catatan kejadian bencana BPBD Kabupaten Gunungkidul, bencana yang pernah terjadi meliputi banjir, cuaca ekstrem (puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi (banjir rob), gempabumi, kekeringan dan tanah longsor. Data kejadian bencana yang pernah terjadi dari tahun 2016 hingga 2022 ditampilkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sejarah Kejadian Bencana di Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2022

Tahun	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Gempabumi	Kekeringan	Tanah Longsor
2016	4	5	15	0	0	2
2017	19	6	0	0	0	4
2018	0	10	0	0	0	2
2019	7	12	0	0	0	4
2020	1	4	0	0	1	1
2021	4	5	0	2	0	6
2022	1	4	0	0	0	3
Total	36	46	15	2	1	22

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2016-2022.

Berdasarkan pada tabel kejadian bencana, bencana yang paling banyak terjadi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun adalah bencana cuaca ekstrem. Dalam hal ini cuaca ekstrem yang terjadi berupa angin puting beliung. Total kejadian cuaca ekstrem mencapai 46 kejadian. Adapun selain bencana cuaca ekstrem, bencana banjir dan tanah longsor juga merupakan bencana yang hampir terjadi di setiap tahunnya. Kejadian bencana mengalami frekuensi kenaikan dan penurunan. Gambar 2.2 menunjukkan grafik kejadian bencana

di Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2022. Grafik tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan kejadian bencana di lokasi tersebut.

Gambar 2.2. Grafik Sejarah Kejadian Bencana di Satuan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2022



Sumber: Hasil Analisis, 2023.

B. Kondisi Kebencanaan SRS PANSELA

1. Kapanewon Girisubo

a. Kondisi Wilayah

Kapanewon Girisubo merupakan salah satu kapanewon yang berada di Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon ini adalah kapanewon paling timur dan paling selatan dari Kabupaten Gunungkidul. Wilayah ini terdiri atas delapan desa, dimana keseluruhannya termasuk ke dalam Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan, Kabupaten Gunungkidul.

Secara administratif Kapanewon Girisubo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
- 3) Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- 4) Sebelah Barat : Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul

Kapanewon Girisubo memiliki 7 (tujuh) potensi bencana yang berdasarkan pada kajian risiko bencana yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Gunungkidul. Potensi bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi (GEA), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

b. Bahaya

Bahaya yang terdapat di Kapanewon Girisubo memiliki kelas yang beragam. Tabel 4.1 menunjukkan kelas bahaya untuk setiap kalurahan di Kapanewon Girisubo. Berdasarkan pada Tabel 2.3, terdapat beberapa wilayah dengan kelas bahaya tinggi. Adapun untuk kekeringan, Kapanewon Girisubo memiliki kelas bahaya kekeringan tinggi untuk seluruh kalurahannya.

Tabel 2.3. Kelas bahaya untuk setiap potensi bencana di Kapanewon Girisubo

No	Kalurahan	Kelas Bahaya						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempabumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Balong	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Jepitu	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Jerukwudel	Sedang		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	
4	Karangawen	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	
5	Nglindur	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	
6	Pucung	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Songbanyu	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Tileng	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

Bahaya cuaca ekstrem merupakan bahaya yang memiliki kelas sedang hingga tinggi di Kapanewon Girisubo. Kalurahan Balong, Jepitu, Karangawen dan Nglindur memiliki kelas bahaya tinggi. Adapun Kalurahan Jerukwudel, Pucung, Songbanyu dan Tileng memiliki kelas bahaya sedang. Kondisi ini dipengaruhi pula oleh penggunaan lahan, dimana daerah Balong, Jepitu, Karangawen, dan Nglindur memiliki lahan terbuka yang cukup luas dan berada pada wilayah yang lebih datar bila dibandingkan dengan kalurahan lainnya di Kapanewon Girisubo.

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi juga terdapat di Kapanewon Girisubo. Tidak seluruh kalurahan di Kapanewon Girisubo memiliki ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi, kalurahan dengan ancaman bencana tersebut adalah Kelurahan Balong, Jepitu, Pucung, Songbanyu dan Tileng. Seluruhnya memiliki kelas bahaya rendah. Adanya potensi bencana ini disebabkan oleh wilayah kalurahan-kalurahan tersebut yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sehingga terdapat potensi bencana tersebut.

Gempabumi dan tsunami juga merupakan ancaman bencana di wilayah Kapanewon Girisubo. Seluruh wilayah di Kapanewon Girisubo memiliki ancaman bencana gempabumi kelas rendah. Adapun bencana tsunami, seperti halnya gelombang ekstrem dan abrasi, merupakan potensi bencana yang berkaitan dengan laut sehingga hanya kalurahan yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang memiliki potensi bencana ini.

Wilayah Kapanewon Girisubo juga memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Kalurahan Pucung merupakan kalurahan dengan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi. Kalurahan lainnya di kapanewon ini memiliki kelas bahaya sedang terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Potensi bencana yang dapat terjadi pula di Kapanewon Girisubo adalah tanah longsor. Seluruh kalurahan memiliki ancaman bencana ini. Meskipun begitu kelas bahaya tanah longsor di Kapanewon Girisubo termasuk ke dalam kelas bahaya rendah.

c. Kerentanan
1) Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial berkaitan dengan penduduk yang tinggal di wilayah Kapanewon Girisubo. Adanya ancaman bencana menimbulkan potensi dampak, salah satunya adalah terhadap masyarakat. Potensi dampak inilah yang kemudian termasuk ke dalam faktor kerentanan dalam analisis bencana. Tabel 2.4 menunjukkan kerentanan sosial yang memiliki beberapa parameter penyusun yaitu jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas.

Tabel 2.4. Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kapanewon Girisubo

No.	Kalurahan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
1	Balong	1.868	383	1.554	11
2	Jepitu	2.521	544	1.915	15
3	Jerukwudel	336	66	234	2
4	Karangawen	707	169	493	34
5	Nglindur	1.211	282	949	18
6	Pucung	47	10	36	0
7	Songbanyu	627	145	505	5
8	Tileng	890	192	682	12

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026.

2) Kerentanan Fisik

Bangunan merupakan salah satu yang akan terdampak saat terjadinya bencana. Bangunan meliputi rumah, bangunan pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Keberadaan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis merupakan hal yang penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.5 menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis di Kapanewon Girisubo.

Tabel 2.5. Fasilitas Umum, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Kritis di Kapanewon Girisubo

No.	Kalurahan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kritis
1	Balong	5	0	0
2	Jepitu	6	0	0
3	Jerukwudel	4	0	0
4	Karangawen	3	0	0
5	Nglindur	6	0	0
6	Pucung	4	0	0
7	Songbanyu	12	0	1
8	Tileng	6	2	0

Sumber: Kecamatan Girisubo dalam Angka, 2023.

3) Kerentanan Ekonomi

Perekonomian di Kapanewon Girisubo didominasi oleh pertanian. Komoditas pertanian di Kapanewon Girisubo meliputi padi bukan sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Pada tahun 2022, luas panen jagung mencapai 2.634 hektar, sedangkan luas panen kacang tanah sebesar 3.084 hektar.

Perekonomian di wilayah ini didukung pula oleh sektor peternakan. Dimana peternakan merupakan salah satu komoditas terbesar pula di Kabupaten Gunungkidul. Adapun beberapa hewan ternak yang dikembangkan di Kapanewon Girisubo adalah sapi, kambing, ayam buras, ayam pedaging, petelur, itik dan entok. Populasi sapi di Kapanewon Girisubo pada tahun 2022 sebanyak 7.836 ekor (Kecamatan Girisubo dalam Angka, 2023).

4) Kerentanan Lingkungan

Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana menjadi faktor penyusun kerentanan lingkungan. Wilayah Girisubo dengan luas sebesar 94,57 km² memiliki potensi kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan lebih dari 50% wilayah Girisubo merupakan tanah kering, dan sekitar 30% dari wilayahnya adalah hutan rakyat. Luas hutan lahan kering di Kapanewon Girisubo mencapai 4.748 hektar, adapun semak belukar mencapai 1.093 hektar (Utomo dkk., 2021).

d. Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi suatu bencana. Kapasitas diukur berdasarkan kesiapan pemerintah melalui program-program pengurangan risiko bencana dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana.

Kemampuan masyarakat menghadapi bencana menjadi salah satu parameter yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana maka pengurangan risiko bencana dapat dilakukan lebih efisien. Kemampuan masyarakat ini tercermin dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana telah dilakukan pada pengkajian risiko bencana. Tabel 2.6 menunjukkan nilai kesiapsiagaan masyarakat Kapanewon Girisubo dalam menghadapi bencana di wilayahnya.

Tabel 2.6. Nilai Kesiapsiagaan Masyarakat Kapanewon Girisubo dalam menghadapi ancaman bencana

No	Kalurahan	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM
1	Balong	0,39	0,36	0,88	0,65	0,35
2	Jepitu	0,36	0,36	1,00	0,53	0,35
3	Jerukwudel	0,30	0,27	0,84	0,75	0,60
4	Karangawen	0,29	0,29	0,75	0,73	0,18
5	Nglindur	0,24	0,09	0,88	0,65	0,56
6	Pucung	0,43	0,36	0,88	0,80	1,00
7	Songbanyu	0,31	0,05	0,20	0,60	1,00
8	Tileng	0,30	0,43	1,01	0,72	0,61

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Keterangan:

PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana

PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat

PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat

KMDP = Ketergantungan Masyarakat Terhadap Pemerintah

PM = Partisipasi Masyarakat

e. Risiko

Adanya potensi bahaya, yang memberikan potensi dampak baik kerugian maupun kerusakan menghasilkan adanya risiko bencana. Risiko bencana beragam bergantung pada jenis bahaya yang mungkin terjadi. Kapasitas menjadi salah satu penentu pula dalam penentuan kelas risiko bencana di suatu wilayah. Tabel 2.7 menunjukkan kelas risiko untuk setiap bencana di Kapanewon Girisubo.

Tabel 2.7. Kelas risiko bencana di Kapanewon Girisubo

No	Kalurahan	Kelas Risiko						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempabumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Balong	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
2	Jepitu	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
3	Jerukwudel	Sedang	-	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	-
4	Karangawen	Rendah	-	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	-
5	Nglindur	Sedang	-	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	-
6	Pucung	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
7	Songbanyu	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
8	Tileng	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

2. Kapanewon Panggang

a. Kondisi Wilayah

Kapanewon Panggang merupakan salah satu kapanewon yang berada di Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Wilayah yang termasuk ke dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul di Kapanewon Panggang hanyalah 4 (empat) kalurahan. Kalurahan tersebut meliputi Kalurahan Girikarto, Girimulyo, Girisekar, dan Giriwungu.

Secara administratif Kapanewon Panggang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Sebelah Timur : Kapanewon Paliyan dan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul
- 3) Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- 4) Sebelah Barat : Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul dan Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

Kapanewon Panggang memiliki 7 (tujuh) potensi bencana yang berdasarkan pada kajian risiko bencana yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Gunungkidul. Potensi bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi (GEA), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

b. Bahaya

Bahaya yang terdapat di Kapanewon Panggang memiliki kelas yang beragam. Tabel 4.6 menunjukkan kelas bahaya untuk setiap kalurahan di Kapanewon Panggang. Berdasarkan pada Tabel 2.8, terdapat beberapa wilayah dengan kelas bahaya tinggi. Adapun untuk gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan, kalurahan di Kapanewon Panggang memiliki kelas sedang.

Tabel 2.8. Kelas bahaya untuk setiap potensi bencana di Kapanewon Panggang

No	Kalurahan	Kelas Bahaya						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempa bumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Girikarto	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
2	Girimulyo	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
3	Girisekar	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
4	Giriwungu	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

Bahaya cuaca ekstrem merupakan bahaya yang memiliki kelas sedang hingga tinggi di Kapanewon Panggang. Kalurahan Girimulyo, Girisekar, dan Giriwungu memiliki kelas bahaya tinggi. Adapun Kalurahan Girikarto memiliki kelas bahaya sedang.

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi juga terdapat di Kapanewon Panggang. Tidak seluruh kalurahan di Kapanewon Panggang memiliki ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi, kalurahan dengan ancaman bencana tersebut adalah Kelurahan Girikarto dan Giriwungu. Dimana seluruhnya memiliki kelas bahaya rendah. Potensi bencana ini disebabkan oleh wilayah kalurahan-kalurahan tersebut yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Gempabumi dan tsunami juga merupakan ancaman bencana di wilayah Kapanewon Panggang. Seluruh wilayah di Kapanewon Panggang memiliki ancaman bencana gempabumi kelas sedang. Adapun bencana tsunami, seperti halnya gelombang ekstrem dan abrasi, merupakan potensi bencana yang berkaitan dengan laut sehingga hanya kalurahan yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang memiliki potensi bencana ini.

Wilayah Kapanewon Panggang juga memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Kalurahan Girikarto, Girimulyo, Girisekar, dan Giriwungu memiliki potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan kelas sedang.

Potensi bencana tanah longsor dapat terjadi pula di Kapanewon Panggang. Seluruh kalurahan yang termasuk ke dalam wilayah SRS memiliki ancaman bencana kelas rendah untuk bencana tanah longsor.

c. Kerentanan

1) Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial berkaitan dengan penduduk yang tinggal di wilayah Kapanewon Panggang. Adanya ancaman bencana menimbulkan potensi dampak, salah satunya adalah terhadap masyarakat. Potensi dampak inilah yang kemudian termasuk ke dalam faktor kerentanan dalam analisis bencana. Tabel 2.9 menunjukkan kerentanan sosial yang memiliki beberapa parameter penyusun yaitu jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas.

Tabel 2.9. Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kapanewon Panggang

No.	Kalurahan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
1	Girikarto	3.023	647	2.810	18
2	Girimulyo	5.001	1.041	3.908	28
3	Girisekar	6.367	1.383	5.098	54
4	Giriwungu	1.749	395	1.497	30

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

2) Kerentanan Fisik

Bangunan merupakan salah satu yang akan terdampak saat terjadinya bencana. Bangunan meliputi rumah, bangunan pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Keberadaan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis merupakan hal yang penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.10 menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis di Kapanewon Panggang.

Tabel 2.10. Fasilitas Umum, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Kritis di Kapanewon Panggang

No.	Kalurahan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kritis
1	Girikarto	6	0	1
2	Girimulyo	8	0	0
3	Girisekar	12	1	0
4	Giriwungu	9	0	0

Sumber: Kecamatan Panggang dalam Angka, 2023.

3) Kerentanan Ekonomi

Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup potensial penyumbang perekonomian di Kapanewon Panggang. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja dengan bercocok tanam terutama tanaman padi dan palawija. Terdapat 8 (delapan) komoditas pertanian di Kapanewon panggang, yang meliputi padi sawah, padi bukan sawah (ladang), ubi kayu, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan sorgum.

Pada tahun 2022, beberapa komoditas memiliki luas panen tertentu. Luas tanam dan luas panen untuk tanaman jagung yaitu 3.156 hektar dan 3.071 hektar. Sedangkan luas tanam dan luas panen kedelai masing-masing sebesar 124,6 hektar dan 96,6 hektar. Ubi kayu memiliki luas tanam dan luas panen yang sama yaitu 2.854 hektar (Kecamatan Panggang dalam Angka, 2023).

4) Kerentanan Lingkungan

Lahan di Kapanewon Panggang terbagi menjadi beberapa penggunaan. Penggunaan lahan terluas di Kapanewon Panggang berupa lahan tanah kering yaitu sebesar 6.786,53 hektar. Di kapanewon ini terdapat pula hutan negara dengan luas sebesar 1.896,13 hektar. Penggunaan lahan lainnya terkait dengan lingkungan adalah sawah yang seluas 30,61 hektar (Kecamatan Panggang dalam Angka, 2023). Adanya penggunaan lahan terkait dengan lingkungan ini menimbulkan adanya potensi kerusakan lingkungan jika bencana melanda daerah tersebut.

d. Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi suatu bencana. Kapasitas diukur berdasarkan kesiapan pemerintah melalui program-program pengurangan risiko bencana dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana.

Kemampuan masyarakat menghadapi bencana menjadi salah satu parameter yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana maka pengurangan risiko bencana dapat dilakukan lebih efisien. Kemampuan masyarakat ini tercermin dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana telah dilakukan pada pengkajian risiko bencana. Tabel 2.11 menunjukkan nilai kesiapsiagaan masyarakat Kapanewon Panggang pada wilayah SRS Pansela dalam menghadapi bencana di wilayahnya.

• Tabel 2.11. Nilai Kesiapsiagaan Masyarakat Kapanewon Panggang dalam menghadapi ancaman bencana

No.	Kalurahan	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM
1	Girikarto	0,24	0,08	0,38	0,40	0,35
2	Girimulyo	0,30	0,15	0,19	0,38	0,53
3	Girisekar	0,23	0,09	0,20	0,40	0,35
4	Giriwungu	0,30	0,16	0,31	0,46	0,58

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Keterangan:

PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana

PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat

PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat

KMDP = Ketergantungan Masyarakat Terhadap Pemerintah

PM = Partisipasi Masyarakat

e. Risiko

Adanya potensi bahaya, yang memberikan potensi dampak baik kerugian maupun kerusakan menghasilkan adanya risiko bencana. Risiko bencana beragam bergantung pada jenis bahaya yang mungkin terjadi. Kapasitas menjadi salah satu penentu pula dalam penentuan kelas risiko bencana di suatu wilayah. Tabel 2.12 menunjukkan kelas risiko untuk setiap bencana di Kapanewon Panggang pada wilayah SRS Pansela.

Tabel 2.12. Kelas risiko bencana di Kapanewon Panggang

No	Kalurahan	Kelas Risiko						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempa bumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Girikarto	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
2	Girimulyo	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	
3	Girisekar	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	
4	Giriwungu	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

3. Kapanewon Purwosari

a. Kondisi Wilayah

Kapanewon Purwosari merupakan salah satu kapanewon yang berada di Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Seluruh kalurahan di Kapanewon Purwosari termasuk ke dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul.

Secara administratif Kapanewon Purwosari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kapanewon Pundong, dan Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
- 2) Sebelah Timur : Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul
- 3) Sebelah Selatan: Samudra Hindia
- 4) Sebelah Barat : Kapanewon Kretek dan Pundong Kabupaten Bantul.

Kapanewon Purwosari memiliki 7 (tujuh) potensi bencana yang berdasarkan pada kajian risiko bencana yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Gunungkidul. Potensi bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi (GEA), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

b. Bahaya

Bahaya yang terdapat di Kapanewon Purwosari memiliki kelas yang beragam. Tabel 4.11 menunjukkan kelas bahaya untuk setiap kalurahan di Kapanewon Purwosari yang termasuk ke dalam SRS Pansela Gunungkidul. Berdasarkan pada Tabel 2.13, terdapat beberapa wilayah dengan kelas bahaya tinggi. Kelas bahaya cuaca ekstrem, dan tsunami memiliki kelas tinggi untuk keseluruhan analisis di wilayah ini.

Tabel 2.13. Kelas bahaya untuk setiap potensi bencana di Kapanewon Purwosari

No	Kalurahan	Kelas Bahaya						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempa bumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Giriasih	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-
2	Giricahyo	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
3	Girijati	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
4	Giripurwo	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
5	Giritirto	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	-

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi juga terdapat di Kapanewon Purwosari. Tidak seluruh kalurahan di Kapanewon Purwosari memiliki ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi, kalurahan dengan ancaman bencana tersebut adalah Kelurahan Giricahyo, Girijati, dan Giripurwo. Seluruhnya memiliki kelas bahaya rendah. Adanya potensi bencana ini disebabkan oleh wilayah kalurahan-kalurahan tersebut yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sehingga terdapat potensi bencana tersebut. Selain gelombang ekstrem dan abrasi wilayah ini juga memiliki ancaman bencana tsunami.

Gempabumi juga merupakan ancaman bencana di wilayah Kapanewon Purwosasi. Seluruh wilayah di Kapanewon Purwosasi memiliki ancaman bencana gempabumi kelas sedang hingga tinggi. Kalurahan dengan kelas bahaya gempabumi tinggi di Kapanewon Purwosari adalah Kalurahan Girijati.

Wilayah Kapanewon Purwosari juga memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Kedua ancaman bencana tersebut memiliki kelas bahaya sedang di seluruh kalurahan Kapanewon Purwosari yang termasuk ke dalam SRS Pansela.

Potensi bencana yang dapat terjadi pula di Kapanewon Purwosari adalah tanah longsor. Seluruh kalurahan memiliki ancaman bencana ini. Meskipun begitu kelas bahaya tanah longsor di Kapanewon Purwosari termasuk ke dalam kelas bahaya rendah.

c. Kerentanan

1) Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial berkaitan dengan penduduk yang tinggal di wilayah Kapanewon Girisubo. Adanya ancaman bencana menimbulkan potensi dampak, salah satunya adalah terhadap masyarakat. Potensi dampak inilah yang kemudian termasuk ke dalam faktor kerentanan dalam analisis bencana. Tabel 2.14 menunjukkan kerentanan sosial yang memiliki beberapa parameter penyusun yaitu jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas.

Tabel 2.14. Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kapanewon Purwosari

No.	Kalurahan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
1	Giriasih	1.252	300	1.047	21
2	Giricahyo	1.859	402	1.414	38
3	Girijati	852	188	550	6
4	Giripurwo	4.287	895	3.750	25
5	Giritirto	2.859	607	2.458	20

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

2) Kerentanan Fisik

Bangunan merupakan salah satu yang akan terdampak saat terjadinya bencana. Bangunan meliputi rumah, bangunan pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Keberadaan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis merupakan hal yang penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.15 menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis di Kapanewon Purwosari.

Tabel 2.15. Fasilitas Umum, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Kritis di Kapanewon Purwosari

No.	Kalurahan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kritis
1	Giriasih	3	0	0
2	Giricahyo	6	0	0
3	Girijati	5	0	0
4	Giripurwo	13	1	0
5	Giritirto	7	0	0

Sumber: Kecamatan Purwosari dalam Angka, 2023.

3) Kerentanan Ekonomi

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kapanewon Purwosari adalah petani. Adapun lahan pertanian di daerah ini berupa sawah tadah hujan, sebagian lagi lahan bukan sawah. Komoditas pertanian di Kapanewon Purwosari meliputi ubi kayu, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Pada tahun 2022, tanaman jagung tercatat menjadi komoditas unggulan luas panen jagung mencapai 1.250,2 hektar (Kecamatan Purwosari dalam Angka, 2023).

4) Kerentanan Lingkungan

Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana menjadi faktor penyusun kerentanan lingkungan. Wilayah Purwosari dengan luas sebesar 71,76 km² memiliki potensi kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan sebesar 0,523 km² merupakan hutan lahan kering, dan semak belukar seluas 0,051 km² (Utomo dkk., 2021). Kondisi ini patut menjadi perhitungan dikarenakan dampak terhadap kerusakan lingkungan dapat disebabkan jika bencana terjadi di wilayah Kapanewon Purwosari.

d. Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi suatu bencana. Kapasitas diukur berdasarkan kesiapan pemerintah melalui program-program pengurangan risiko bencana dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana.

Kemampuan masyarakat menghadapi bencana menjadi salah satu parameter yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana maka pengurangan risiko bencana dapat dilakukan lebih efisien. Kemampuan masyarakat ini tercermin dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana telah dilakukan pada pengkajian risiko bencana. Tabel 2.16 menunjukkan nilai kesiapsiagaan masyarakat Kapanewon Purwosari pada wilayah SRS Pansela dalam menghadapi bencana di wilayahnya.

Tabel 2.16. Nilai Kesiapsiagaan Masyarakat Kapanewon Purwosari dalam menghadapi ancaman bencana

No.	Kalurahan	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM
1	Giriasih	0,35	0,23	0,38	0,55	1,00
2	Giricahyo	0,24	0,12	0,20	0,55	1,00
3	Girijati	0,39	0,24	0,20	0,40	0,35
4	Giripurwo	0,30	0,14	0,33	0,56	0,71
5	Giritirto	0,30	0,22	0,50	0,60	0,84

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Keterangan:

PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana

PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat

PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat

KMDP = Ketergantungan Masyarakat Terhadap Pemerintah

PM = Partisipasi Masyarakat

e. Risiko

Adanya potensi bahaya, yang memberikan potensi dampak baik kerugian maupun kerusakan menghasilkan adanya risiko bencana. Risiko bencana beragam bergantung pada jenis bahaya yang mungkin terjadi. Kapasitas menjadi salah satu penentu pula dalam penentuan kelas risiko bencana di suatu wilayah. Tabel 2.17 menunjukkan kelas risiko untuk setiap bencana di Kapanewon Purwosari pada wilayah SRS Pansela.

Tabel 2.17. Kelas risiko bencana di Kapanewon Purwosari

No	Kalurahan	Kelas Risiko						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempa bumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Giriasih	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	
2	Giricahyo	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
3	Girijati	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
4	Giripurwo	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
5	Giritirto	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

4. Kapanewon Saptosari

a. Kondisi Wilayah

Kapanewon Saptosari merupakan salah satu kapanewon yang berada di Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Seluruh wilayah Kapanewon ini termasuk dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul.

Secara administratif Kapanewon Saptosari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Sebelah Timur : Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul
- 3) Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- 4) Sebelah Barat : Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

Kapanewon Panggang memiliki 7 (tujuh) potensi bencana yang berdasarkan pada kajian risiko bencana yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Gunungkidul. Potensi bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi (GEA), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

b. Bahaya

Bahaya yang terdapat di Kapanewon Saptosari memiliki kelas yang beragam. Tabel 2.18 menunjukkan kelas bahaya untuk setiap kalurahan di Kapanewon Saptosari. Berdasarkan pada Tabel 2.18, terdapat beberapa wilayah dengan kelas bahaya tinggi seperti bencana cuaca ekstrem dan tsunami.

Tabel 2.18. Kelas bahaya untuk setiap potensi bencana di Kapanewon Saptosari

No	Kalurahan	Kelas Bahaya						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempabumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Jetis	Tinggi		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	
2	Kanigoro	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Kepek	Tinggi		Sedang		Tinggi	Rendah	
4	Krambilsawit	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
5	Monggol	Tinggi		Sedang		Tinggi	Rendah	
6	Nglora	Tinggi		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	
7	Planjan	Tinggi		Sedang		Tinggi	Rendah	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi memiliki sebaran bahaya yang sama dengan bahaya tsunami. Tidak seluruh kalurahan di Kapanewon Saptosari memiliki ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi, kalurahan dengan ancaman bencana tersebut adalah Kelurahan Kanigoro dan Krambilsawit. Seluruhnya memiliki kelas bahaya gelombang ekstrem dan abrasi yang rendah, namun memiliki kelas bahaya tsunami yang tinggi. Adanya potensi bencana ini disebabkan oleh wilayah kalurahan-kalurahan tersebut yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sehingga terdapat potensi bencana tersebut.

Gempabumi juga merupakan ancaman bencana di wilayah Kapanewon Saptosari. Seluruh wilayah di Kapanewon Saptosari memiliki ancaman bencana gempabumi kelas sedang.

Wilayah Kapanewon Saptosari juga memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun tidak seluruh wilayahnya memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Kalurahan dengan ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan adalah Kalurahan Jetis, Kanigoro, Krambilsawit, dan Nglora. Kalurahan-kalurahan tersebut memiliki kelas bahaya sedang untuk potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kekeringan juga merupakan salah satu bencana yang berpotensi terjadi di Kapanewon Saptosari. Kelas bahaya kekeringan mulai dari sedang hingga tinggi. Kalurahan dengan kelas bahaya kekeringan tinggi di Kapanewon Saptosari adalah Kanigoro, Kepek, Monggol, dan Planjan.

Potensi bencana tanah longsor juga terdapat di Kapanewon Saptosari. Seluruh kalurahan memiliki ancaman bencana ini. Meskipun begitu kelas bahaya tanah longsor di Kapanewon Saptosari termasuk ke dalam kelas bahaya rendah.

c. Kerentanan
1) Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial berkaitan dengan penduduk yang tinggal di wilayah Kapanewon Saptosari. Adanya ancaman bencana menimbulkan potensi dampak, salah satunya adalah terhadap masyarakat. Potensi dampak inilah yang kemudian termasuk ke dalam faktor kerentanan dalam analisis bencana. Tabel 2.19 menunjukkan kerentanan sosial yang memiliki beberapa parameter penyusun yaitu jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas.

Tabel 2.19. Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kapanewon Saptosari

No.	Kalurahan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
1	Jetis	5.065	1.004	3.878	35
2	Kanigoro	3.086	632	2.607	15
3	Kepek	5.397	1.094	4.772	35
4	Krambilsawit	4.309	874	3.672	7
5	Monggol	4.121	851	3.317	76
6	Nglora	2.489	494	2.197	13
7	Planjan	2.782	581	2.202	35

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026.
Kerentanan Fisik

Bangunan merupakan salah satu yang akan terdampak saat terjadinya bencana. Bangunan meliputi rumah, bangunan pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Keberadaan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis merupakan hal yang penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.20 menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis di Kapanewon Saptosari.

Tabel2. 20. Fasilitas Umum, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Kritis di Kapanewon Saptosari

No.	Kalurahan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kritis
1	Jetis	12	2	0
2	Kanigoro	10	0	0
3	Kepek	9	0	0
4	Krambilsawit	13	0	0
5	Monggol	8	0	0
6	Nglora	6	0	0
7	Planjan	12	1	0

Sumber: Kecamatan Saptosari dalam Angka, 2023.

2) Kerentanan Ekonomi

Sebagian besar penduduk di Kapanewon Saptosari bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian di Kapanewon Saptosari didominasi oleh pertanian. Komoditas pertanian di Kapanewon Saptosari meliputi padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi (Kecamatan Saptosari dalam Angka, 2023).

3) Kerentanan Lingkungan

Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana menjadi faktor penyusun kerentanan lingkungan. Wilayah Saptosari dengan luas sebesar 87,83 km² memiliki potensi kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan, di Kapanewon Saptosari terdapat hutan lahan kering dengan luas sebesar 0,196 km², dan semak belukar dengan luas sebesar 0,1369 km² (Utomo dkk., 2021). Kondisi ini patut menjadi perhitungan dikarenakan dampak terhadap kerusakan lingkungan dapat disebabkan jika bencana terjadi di wilayah Kapanewon Saptosari.

d. Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi suatu bencana. Kapasitas diukur berdasarkan kesiapan pemerintah melalui program-program pengurangan risiko bencana dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana.

Kemampuan masyarakat menghadapi bencana menjadi salah satu parameter yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana maka pengurangan risiko bencana dapat dilakukan lebih efisien. Kemampuan masyarakat ini tercermin dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana telah dilakukan pada pengkajian risiko bencana. Tabel 2.21 menunjukkan nilai kesiapsiagaan masyarakat Kapanewon Saptosari dalam menghadapi bencana di wilayahnya.

Tabel2. 21. Nilai Kesiapsiagaan Masyarakat Kapanewon Saptosari dalam menghadapi ancaman bencana

No.	Kalurahan	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM
1	Jetis	0,06	0,03	0,38	0,53	0,40
2	Kanigoro	0,29	0,24	0,38	0,55	1,00
3	Kepek	0,16	0,21	0,38	0,40	0,35
4	Krambilsawit	0,30	0,17	0,29	0,42	0,63
5	Monggol	0,30	0,23	0,60	0,50	0,57
6	Nglora	0,35	0,21	0,38	0,40	0,35
7	Planjan	0,30	0,36	0,70	0,62	0,87

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Keterangan:

PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana

PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat

PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat

KMDP = Ketergantungan Masyarakat Terhadap Pemerintah

PM = Partisipasi Masyarakat

e. Risiko

Adanya potensi bahaya, yang memberikan potensi dampak baik kerugian maupun kerusakan menghasilkan adanya risiko bencana. Risiko bencana beragam bergantung pada jenis bahaya yang mungkin terjadi. Kapasitas menjadi salah satu penentu pula dalam penentuan kelas risiko bencana di suatu wilayah. Tabel 2.22 menunjukkan kelas risiko untuk setiap bencana di Kapanewon Saptosari pada wilayah SRS Pansela.

Tabel2.22. Kelas risiko bencana di Kapanewon Saptosari

No	Kalurahan	Kelas Risiko						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempabumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Jetis	Sedang		Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	
2	Kanigoro	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
3	Kepek	Sedang		Sedang		Tinggi	Rendah	
4	Krambilsawit	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
5	Monggol	Sedang		Sedang		Tinggi	Rendah	
6	Nglora	Sedang		Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	
7	Planjan	Sedang		Sedang		Sedang	Rendah	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

5. Kapanewon Tanjungsari

a. Kondisi Wilayah

Kapanewon Tanjungsari merupakan salah satu kapanewon yang berada di Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Wilayah yang termasuk ke dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul di Kapanewon Tanjungsari hanyalah 3 (tiga) kalurahan. Kalurahan tersebut meliputi Kalurahan Banjarejo, Kemadang, dan Ngestirejo

Secara administratif Kapanewon Tanjungsari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Sebelah Timur : Kapanewon Semanu dan Tepus, Kabupaten Gunungkidul
- 3) Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- 4) Sebelah Barat : Kapanewon Saptosari dan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.

Kapanewon Tanjungsari memiliki 6 (enam) potensi bencana yang berdasarkan pada kajian risiko bencana yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Gunungkidul. Potensi bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi (GEA), kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

b. Bahaya

Bahaya yang terdapat di Kapanewon Tanjungsari memiliki kelas yang beragam. Tabel 2.23 menunjukkan kelas bahaya untuk setiap kalurahan di Kapanewon Tanjungsari yang berada pada kawasan SRS Pansela Gunungkidul. Berdasarkan pada Tabel 2.23, terdapat beberapa wilayah dengan kelas bahaya tinggi. Bahaya cuaca ekstrem, kekeringan, dan tsunami seluruhnya memiliki kelas bahaya tinggi.

Tabel 2.23. Kelas bahaya untuk setiap potensi bencana di Kapanewon Tanjungsari

No	Kalurahan	Kelas Bahaya						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempa bumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Banjarejo	Tinggi	Rendah	Sedang		Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Kemadang	Tinggi	Rendah	Sedang		Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Ngestirejo	Tinggi	Rendah	Rendah		Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

Gempabumi merupakan ancaman bencana di wilayah SRS Pansela Kapanewon Tanjungsari. Kalurahan Banjarejo dan Kemadang memiliki kelas bahaya gempabumi sedang, sedangkan Kalurahan Ngestirejo memiliki kelas bahaya gempabumi rendah.

Seluruh wilayah di Kapanewon Tanjungsari yang berada pada SRS Pansela Gunungkidul memiliki ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Kelas bahaya gelombang ekstrem dan abrasi seluruhnya termasuk ke dalam kelas rendah. Adapun gelombang ekstrem dan abrasi, merupakan potensi bencana yang berkaitan dengan laut sehingga hanya kalurahan yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang memiliki potensi bencana ini.

Wilayah Kapanewon Tanjungsari tidak memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi bencana lainnya seperti tanah longsor dapat terjadi di wilayah ini. Seluruh kalurahan SRS Pansela di Kapanewon Tanjungsari memiliki ancaman bencana ini. Meskipun begitu kelas bahaya tanah longsor di Kapanewon Tanjungsari termasuk ke dalam kelas bahaya rendah.

c. Kerentanan

1) Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial berkaitan dengan penduduk yang tinggal di wilayah Kapanewon Tanjungsari. Adanya ancaman bencana menimbulkan potensi dampak, salah satunya adalah terhadap masyarakat. Potensi dampak inilah yang kemudian termasuk ke dalam faktor kerentanan dalam analisis bencana. Tabel 2.24 menunjukkan kerentanan sosial yang memiliki beberapa parameter penyusun yaitu jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas.

Tabel 2.24. Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kapanewon Tanjungsari

No.	Kalurahan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
1	Banjarejo	4.134	893	3.139	33
2	Kemadang	4.051	777	3.137	19
3	Ngestirejo	4.488	940	3.682	42

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026.

2) Kerentanan Fisik

Bangunan merupakan salah satu yang akan terdampak saat terjadinya bencana. Bangunan meliputi rumah, bangunan pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Keberadaan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis merupakan hal yang penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.25 menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis di Kapanewon Tanjungsari.

Tabel 2.25. Fasilitas Umum, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Kritis di Kapanewon Tanjungsari

No.	Kalurahan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kritis
1	Banjarejo	9	0	0
2	Kemadang	11	0	0
3	Ngestirejo	7	0	0

Sumber: Kecamatan Tanjungsari dalam Angka, 2023.

3) Kerentanan Ekonomi

Salah satu pembangun perekonomian di Kapanewon Tanjungsari adalah pertanian. Komoditas pertanian di Kapanewon Tanjungsari meliputi jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan sorgum.

Pada tahun 2022, beberapa komoditas memenuhi luas panen. Luas panen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman cukup umur. Luas panen untuk jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu berturut-turut adalah 1.944 hektar, 17 hektar, 2.235 hektar, dan 1.820 hektar (Kecamatan Tanjungsari dalam Angka, 2023).

4) Kerentanan Lingkungan

Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana menjadi faktor penyusun kerentanan lingkungan. Wilayah Tanjungsari dengan luas sebesar 71,63 km² memiliki potensi kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan, di Kapanewon Tanjungsari terdapat hutan lahan kering dengan luas sebesar 0,2858 km², dan semak belukar dengan luas sebesar 0,2031 km² (Utomo dkk., 2021). Kondisi ini patut menjadi perhitungan dikarenakan dampak terhadap kerusakan lingkungan dapat disebabkan jika bencana terjadi di wilayah Kapanewon Tanjungsari.

d. Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi suatu bencana. Kapasitas diukur berdasarkan kesiapan pemerintah melalui program-program pengurangan risiko bencana dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana.

Kemampuan masyarakat menghadapi bencana menjadi salah satu parameter yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana maka pengurangan risiko bencana dapat dilakukan lebih efisien. Kemampuan masyarakat ini tercermin dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana telah dilakukan pada pengkajian risiko bencana. Tabel 2.26 menunjukkan nilai kesiapsiagaan masyarakat Kapanewon Tanjungsari pada wilayah SRS Pansela dalam menghadapi bencana di wilayahnya.

• Tabel 2.26. Nilai Kesiapsiagaan Masyarakat Kapanewon Tanjungsari dalam menghadapi ancaman bencana

No.	Kalurahan	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM
1	Banjarejo	0,21	0,36	1,00	0,65	0,35
2	Kemadang	0,50	0,49	1,00	0,80	1,00
3	Ngestirejo	0,28	0,31	0,75	0,65	0,35

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Keterangan:

PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana

PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat

PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat

KMDP = Ketergantungan Masyarakat Terhadap Pemerintah

PM = Partisipasi Masyarakat

e. Risiko

Adanya potensi bahaya, yang memberikan potensi dampak baik kerugian maupun kerusakan menghasilkan adanya risiko bencana. Risiko bencana beragam bergantung pada jenis bahaya yang mungkin terjadi. Kapasitas menjadi salah satu penentu pula dalam penentuan kelas risiko bencana di suatu wilayah. Tabel 2.27 menunjukkan kelas risiko untuk setiap bencana di Kapanewon Tanjungsari pada wilayah SRS Pansela.

Tabel2.27. Kelas risiko bencana di Kapanewon Tanjungsari

No	Kalurahan	Kelas Risiko						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempa bumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Banjarejo	Sedang	Rendah	Sedang	-	Sedang	Rendah	Sedang
2	Kemadang	Sedang	Rendah	Sedang	-	Sedang	Rendah	Sedang
3	Ngestirejo	Sedang	Rendah	Rendah	-	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

6. Kapanewon Tepus

a. Kondisi Wilayah

Kapanewon Tepus merupakan salah satu kapanewon yang berada di Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Wilayah yang termasuk ke dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul di Kapanewon Tepus hanyalah 3 (tiga) kalurahan. Kalurahan tersebut meliputi Kalurahan Purwodadi, Sidoharjo, dan Tepus.

Secara administratif Kapanewon Tepus berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara : Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Sebelah Timur : Kapanewon Rongkop dan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
- 3. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- 4. Sebelah Barat : Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Kapanewon Tepus memiliki 7 (tujuh) potensi bencana yang berdasarkan pada kajian risiko bencana yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Gunungkidul. Potensi bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi (GEA), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

b. Bahaya

Bahaya yang terdapat di Kapanewon Tepus memiliki kelas yang beragam. Tabel 2.28 menunjukkan kelas bahaya untuk setiap kalurahan pada SRS Pansela Gunungkidul di Kapanewon Tepus. Berdasarkan pada Tabel 2.28, terdapat beberapa wilayah dengan kelas bahaya tinggi. Adapun untuk cuaca ekstrem, kekeringan, dan tsunami memiliki kelas bahaya tinggi seluruhnya.

Tabel I.28. Kelas bahaya untuk setiap potensi bencana di Kapanewon Tepus

No	Kalurahan	Kelas Bahaya						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempa bumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Purwodadi	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Sidoharjo	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Tepus	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi, gempabumi dan tanah longsor merupakan ancaman bencana yang terdapat di setiap kalurahan pada wilayah SRS Pansela Gunungkidul. Ketiga jenis bencana tersebut tersebar di Kalurahan Purwodadi, Sidoharjo, dan Tepus. Ketiganya memiliki ancaman bencana kelas rendah. juga terdapat di Kapanewon Tepus.

c. Kerentanan
1) Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial berkaitan dengan penduduk yang tinggal di wilayah Kapanewon Tepus. Adanya ancaman bencana menimbulkan potensi dampak, salah satunya adalah terhadap masyarakat. Potensi dampak inilah yang kemudian termasuk ke dalam faktor kerentanan dalam analisis bencana. Tabel 2.29 menunjukkan kerentanan sosial yang memiliki beberapa parameter penyusun yaitu jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas.

Tabel 2.29. Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kapanewon Tepus

No.	Kalurahan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
1	Purwodadi	2.381	493	1.912	18
2	Sidoharjo	4.404	915	3.493	102
3	Tepus	4.197	862	3.239	24

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026.

2) Kerentanan Fisik

Bangunan merupakan salah satu yang akan terdampak saat terjadinya bencana. Bangunan meliputi rumah, bangunan pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Keberadaan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis merupakan hal yang penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.30 menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kritis di Kapanewon Tepus.

Tabel 2.30. Fasilitas Umum, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Kritis di Kapanewon Tepus

No.	Kalurahan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kritis
1	Purwodadi	10	3	0
2	Sidoharjo	8	2	0
3	Tepus	14	0	0

Sumber: Kecamatan Tepus dalam Angka, 2023.

3) Kerentanan Ekonomi

Sektor pertanian merupakan sektor penyokong perekonomian yang potensial di Kapanewon Tepus. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani terutama pada komoditas padi dan palawija. Komoditas pertanian di Kapanewon Tepus meliputi padi sawah, padi ladang, ubi kayu, jagung, kedelai, dan kacang tanah.

Pada tahun 2022, beberapa komoditas menghasilkan luas panen. Luas panen jagung mencapai 3.162 hektar, sedangkan luas penanamannya sebesar 3.084 hektar. Tanaman kedelai memiliki luas tanam dan luas panen yang sama yaitu 100 hektar. Luas tanam dan luas panen kacang tanah sebesar 2.428 hektar dan 2.046 hektar. Sedangkan luas tanam dan luas panen ubi kayu adalah 3.045 hektar dan 2.046 hektar (Kecamatan Tepus dalam Angka, 2023).

4) Kerentanan Lingkungan

Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana menjadi faktor penyusun kerentanan lingkungan. Wilayah Tepus dengan luas sebesar 104,91 km² memiliki potensi kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan, di Kapanewon Tepus terdapat hutan lahan kering dengan luas sebesar 0,4933 km², dan semak belukar dengan luas sebesar 0,1966 km² (Utomo dkk., 2021). Kondisi ini patut menjadi perhitungan dikarenakan dampak terhadap kerusakan lingkungan dapat disebabkan jika bencana terjadi di wilayah Kapanewon Tepus.

d. Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi suatu bencana. Kapasitas diukur berdasarkan kesiapan pemerintah melalui program-program pengurangan risiko bencana dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana.

Kemampuan masyarakat menghadapi bencana menjadi salah satu parameter yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana maka pengurangan risiko bencana dapat dilakukan lebih efisien. Kemampuan masyarakat ini tercermin dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana telah dilakukan pada pengkajian risiko bencana. Tabel 2.31 menunjukkan nilai kesiapsiagaan masyarakat Kapanewon Tepus pada wilayah SRS Pansela dalam menghadapi bencana di wilayahnya.

Tabel 2.31. Nilai Kesiapsiagaan Masyarakat Kapanewon Tepus dalam menghadapi ancaman bencana

No.	Kalurahan	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM
1	Purwodadi	0,30	0,31	0,71	0,69	0,55
2	Sidoharjo	0,30	0,27	0,61	0,61	0,48
3	Tepus	0,30	0,25	0,50	0,66	0,63

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Keterangan:

PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana

PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat

PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat

KMDP = Ketergantungan Masyarakat Terhadap Pemerintah

PM = Partisipasi Masyarakat

e. Risiko

Adanya potensi bahaya, yang memberikan potensi dampak baik kerugian maupun kerusakan menghasilkan adanya risiko bencana. Risiko bencana beragam bergantung pada jenis bahaya yang mungkin terjadi. Kapasitas menjadi salah satu penentu pula dalam penentuan kelas risiko bencana di suatu wilayah. Tabel 2.32 menunjukkan kelas risiko untuk setiap bencana di Kapanewon Tepus pada wilayah SRS Pansela.

Tabel 2.32. Kelas risiko bencana di Kapanewon Tepus

No	Kalurahan	Kelas Risiko						
		Cuaca Ekstrem	GEA	Gempabumi	Karhutla	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
1	Purwodadi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
2	Sidoharjo	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
3	Tepus	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul, 2022-2026 dengan modifikasi.

f. Aksesibilitas Kawasan

Lokasi satuan ruang strategis Pantai selatan berada di wilayah Geo-Heritage. Secara administrasi cakupan wilayah Perencanaan berada di 7 kapanewon. Kapanewon tersebut antara lain Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. 7 wilayah administrasi dibagi ke dalam 3 kawasan meliputi kawasan barat, Kawasan Tengah, dan Kawasan Timur. Akses menuju Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan dapat ditempuh melalui 3 Jalur, yaitu: Jalur Barat, Utara dan Timur. Akses melalui jalur barat melewati Kabupaten Bantul, Akses melalui Jalur Utara melewati Kota Yogyakarta atau Kabupaten Klaten, dan Akses melalui jalur Timur melalui Kabupaten Wonogiri atau Pacitan.

Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan telah didukung dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang difungsikan sebagai jalan arteri serta jalan kolektor, dengan demikian jaringan jalan ini merupakan aspek yang dapat mendorong pengembangan Strategis di wilayah. Terdapat 3 Komponen utama yang menunjang dalam konektifikasi transportasi menuju lokasi Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan, meliputi:

- 1) jalan yang arteri yang berfungsi sebagai penghubung antar Ibu Kota Provinsi dan pusat-pusat pengembangan nasional/ kawasan pariwisata, moda transportasi yang digunakan adalah Bus khusus Pariwisata dan transportasi umum antara lain adalah Bus AKAP, Kereta Api, serta Kendaraan Pribadi.
- 2) jalan kolektor yang berfungsi sebagai penghubung antara Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten dan pusat-pusat pengembangan wilayah provinsi/obyek-obyek wisata di dalam wilayah provinsi, moda transportasi yang digunakan adalah bus khusus pariwisata dan untuk umum dapat digunakan Bus AKDP, serta Kendaraan Pribadi.
- 3) jalan Lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara Ibu Kota Kabupaten dengan wilayah Kapanewon dan pusat-pusat pengembangan wilayah kabupaten/obyek-obyek wisata, moda transportasi yang digunakan adalah bus wisata dan untuk umum bus AKDP, angkutan penumpang lokal serta Kendaraan Pribadi.

BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN

A. Kebijakan Pembangunan

Sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Inisiasi Sri Sultan Hamengkubowono X dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan mengembangkan konsep paradigma among tani dagang layar yang dicetuskan saat penyampaian visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 September 2012.

Konsep Among Tani Dagang Layar memiliki makna secara filosofis dan praktiknya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekankan pembangunan maritim sebagai salah satu fokus dan opsi dalam pengembangan wilayah pantai selatan yang berperan sebagai pintu gerbang dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga arahan dalam kebijakan Kasultanan menekankan bahwa pentingnya konsep tersebut sebagai upaya yang dilakukan dalam membangkitkan potensi Pantai Selatan yang dimiliki serta melakukan integrasi kebijakan-kebijakan sebelumnya yang cenderung bercorak pertanian yang saling melengkapi satu sama lain.

Bagi kawasan pantai selatan Gunungkidul Dimensi konsep among tani dagang layar berbicara pada komponen pengembangan sumberdaya alam (darat, laut, udara) dan juga konsep layar jika ditransformasikan ke dalam fragmentasi dunia saat ini berbicara mengenai *cyber/digital technology*. Bagaimana kebermanfaatan kawasan pantai selatan menjadi inovasi digital dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan promosi sumberdaya alam, budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengembangan kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat di Pantai Selatan Gunungkidul.

Paradigma among tani dagang layar memberikan gambaran secara umum mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlandaskan konsep maritim. Arah kebijakan pembangunan pada konsep among tani dagang layar dimaksud dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang terdapat di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Sehingga orientasi dimensi pembangunan pada penyediaan dan dukungan baik secara infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan program-program yang mengarah kepada konsep among tani dagang layar tersebut. Program-program pembangunan yang dilaksanakan dilakukan dalam mendukung among tani dagang layar berupa Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat guna mendukung dan meningkatkan akses di kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebijakan pembangunan yang diarahkan pada pembangunan kawasan pantai selatan di Kabupaten Gunungkidul secara umum dilakukan untuk mengentaskan kompleksitas permasalahan yang ada di pantai selatan sejak lama sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan

ekonomi yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat yang ada di pantai selatan Kabupaten Gunungkidul.

Menyelaraskan dengan konsep tersebut RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 – 2026 menetapkan visi untuk mewujudkan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah Pantai Selatan Gunungkidul diharapkan mampu menjadi pendorong dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat yang ada di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul.

B. Kebijakan Tata Ruang

Kawasan SRS Pansela secara delineasi berada di dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu. Karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang terutama pada batuan karbonat sebagai akibat proses pelarutan. Kawasan karst merupakan ekosistem yang unik ditinjau dari aspek fisik, biotik, dan sosial masyarakatnya. Keunikan bentang alam karst ditandai oleh ciri-ciri spesifik yang ada di permukaan (eksokarst), seperti dolin, uvala, polye, lembah kering, telaga karst, pola aliran yang masuk dalam tanah dan ciri-ciri fisik bawah permukaan (endokarst) seperti sungai bawah tanah.

KBAK Gunungsewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global yang didukung oleh UNESCO pada 19 September 2015 di Tottori, Jepang. Pada bulan November 2015 Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Geopark Gunung Sewu terdiri dari 33 situs, yang tersebar di tiga Geo Area, yaitu Geo Area Gunungkidul sebanyak 13 geo tapak, Geo Area Wonogiri sebanyak 7 geo-tapak, dan Geo Area Pacitan sebanyak 13 geo tapak.

Geosite yang berada di wilayah Gunungkidul meliputi : Gunung Api Miosen Awal (Formasi Nglanggeran); Endapan Laut Miosen Awal (Formasi Sambipitu); Gua Pindul; Komplek Luweng Kalisuci; Luweng Jomblang; Pantai Siung dan Wediombo; Lembah Kering Purba Sadeng; Air Terjun Bleberan (Sri Gethuk); Luweng Cokro; Goa Ngingrong; Geoforest Turunan; Geoforest Wanagama; Pantai Baron, Kukup, dan Krakal.

Sesuai dengan visi tata ruang Kabupaten Gunungkidul, penataan ruang daerah diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumiarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang wilayah yang produktif; aman dan nyaman; adil dan berkelanjutan; dan berpedoman pada mitigasi bencana. Tinjauan Kawasan Strategis Pantai Selatan Gunungkidul terhadap RTRW Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari pengembangan jaringan dan pengembangan tata ruang dijabarkan pada uraian di bawah ini.

Terkait rencana pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer Ruas jalan Pantai Selatan akan dikembangkan meliputi:

- a. Batas Kabupaten Bantul-Panggang
- b. Temanggung-Kemiri
- c. Baron-Tepus
- d. Tepus-jepitu-Jerukwudel
- e. Baran-Jerukwudel.

Rencana pengembangan Terminal Penumpang tipe C di Baron, Desa Kemadang Kapanewon Tanjungsari serta rencana pengembangan area peristirahatan (rest area) di Desa Girijati Kapanewon Purwosari di Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela). Terkait sistem jaringan prasarana transportasi laut, selain itu juga direncanakan pengembangan rute layaran wisata bahari yang menghubungkan Pantai Sadeng, Pantai Wediombo, Pantai Drini, dan Pantai Baron.

Di wilayah SRS PANSELA juga akan dikembangkan prasarana sumberdaya energi alternatif yang meliputi:

- a. Pengembangan energi gelombang di Parangradjuk, Desa Kanigoro Kapanewon Saptosari
- b. Pengembangan bahan bakar nabati di Kapanewon Saptosari dan Tepus
- c. Pengembangan energi mikrohidro di Sungai Bawah Tanah Bribin dan Seropan
- d. Pengembangan energi surya di Kapanewon Tanjungsari, Tepus, Purwosari, dan Saptosari

Kawasan perlindungan sempadan pantai seluas kurang lebih 770 (tujuh ratus tujuh puluh) hektar direncanakan di sepanjang daratan Pantai Selatan Gunungkidul dengan lebar minimum 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya direncanakan berada pada wilayah sebagai berikut:

- a. Kawasan suaka alam meliputi Hutan Adat Gunung Bajo di Desa Purwodadi, Kapanewon Tepus seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
- b. Kawasan suaka alam ekosistem pantai meliputi Kawasan Pantai Konservasi Wediombo seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar
- c. Kawasan suaka margasatwa meliputi:
 - 1) Kawasan suaka margasatwa burung walet di Desa Giripurwo dan Desa Giricahyo Kapanewon Purwosari; Desa Girikarto Kapanewon Panggang; dan Desa Pucung, Desa Songbanyu, Desa Jepitu Kapanewon Girisubo
 - 2) Kawasan suaka margasatwa kelelawar dan flora fauna khas goa karst di Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, dan Kapanewon Girisubo
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 - 1) Kawasan Konservasi Goa Arkeologi di karst Gunungsewu mencakup Goa Seropan, Goa Bentar, Goa Braholo, Titir, Song Gupuh, Song Keplek, dan Goa Tabuhan
 - 2) Kawasan Petilasan Sunan Kalijaga di Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Tepus
 - 3) Kawasan Situs Klepu dan Situs Karanggebang di Kapanewon Tepus
 - 4) Kawasan Pesanggrahan Gembirwati di Kapanewon Purwosari
 - 5) Kawasan Petilasan Kembang Lampir dan Cupu Panjolo di Kapanewon Panggang

Kawasan Lindung Lainnya direncanakan pada wilayah sebagai berikut:

- a. Kawasan perlindungan plasma nutfah pada Hutan Plasma Nutfah Tanaman Langka Koesnadi Hardjasoemantri di Desa Purwodadi, Kapanewon Tepus seluas kurang lebih 6 (enam) hektar
- b. Kawasan suaka alam ekosistem pantai meliputi Kawasan Pantai Konservasi Wediombo seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar
- c. Kawasan suaka margasatwa meliputi:

- 1) Kawasan suaka margasatwa burung walet di Desa Giripurwo dan Desa Giricahyo Kapanewon Purwosari; Desa Girikarto Kapanewon Panggang; dan Desa Pucung, Desa Songbanyu, Desa Jepitu Kapanewon GiriSubo
- 2) Kawasan suaka margasatwa kelelawar dan flora fauna khas goa karst di Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, dan Kapanewon GiriSubo
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 - 1) Kawasan Konservasi Goa Arkeologi di karst Gunungsewu mencakup Goa Seropan, Goa Bentar, Goa Braholo, Titir, Song Gupuh, Song Keplek, dan Goa Tabuhan
 - 2) Kawasan Petilasan Sunan Kalijaga di Kapanewon GiriSubo dan Kapanewon Tepus
 - 3) Kawasan Situs Klepu dan Situs Karanggebang di Kapanewon Tepus
 - 4) Kawasan Pesanggrahan GembiraRowati di Kapanewon Purwosari
 - 5) Kawasan Petilasan Kembang Lampir dan Cupu Panjolo di Kapanewon Panggang

Berkaitan dengan Kawasan Rawan Bencana Alam, wilayah perencanaan Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul berada pada kawasan rawan kekeringan dan rawan gelombang pasang dan tsunami. Sementara itu rencana penetapan Kawasan Lindung Geologi yang ditetapkan meliputi:

- a. Kawasan keunikan bentang alam perbukitan Karst Gunungsewu yang terletak di wilayah perencanaan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul
- b. Kawasan keunikan proses geologi yang mencakup:
 - 1) Kawasan telaga doline di Kapanewon GiriSubo dan Kapanewon Purwosari
 - 2) Pantai aliran lava di Kawasan Pantai Wediombo di Kapanewon GiriSubo
 - 3) Kawasan Sungai bengawan Solo Purba di Kapanewon GiriSubo

Alokasi penetapan Kawasan Lindung Lainnya direncanakan sebagai berikut:

- a. Kawasan perlindungan plasma nutfah pada Hutan Plasma Nutfah Tanaman Langka Koesnadi Hardjasoemantri di Desa Purwodadi, Kapanewon Tepus seluas kurang lebih 6 (enam) hektar
- b. Kawasan terumbu karang tepi di sepanjang pantai seluas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar meliputi Pantai Krokoh, Pantai Wediombo, Pantai Siung, Pantai Krakal, Pantai Kukup, Pantai Sundak, Pantai Drini, Pantai Baron, Pantai Ngrenahan, Pantai Nguyahan, dan Pantai Gesing
- c. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagai tempat migrasi dan perkembangbiakan satwa penyu laut di Pantai Drini, Kapanewon Tepus

Semua Kapanewon di wilayah perencanaan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul diperuntukkan sebagai kawasan pertanian yang meliputi tanam pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan kawasan peruntukan perikanan direncanakan sebagai berikut:

- a. Kawasan budidaya air tawar di semua Kapanewon di wilayah perencanaan
 - b. Kawasan budi daya perikanan laut di Kapanewon Tepus
 - c. Kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir di semua Kapanewon wilayah perencanaan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul
- Terdapat rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Sadeng Kapanewon GiriSubo.

Terdapat beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang direncanakan akan disediakan di wilayah SRS meliputi:

- a. PPI di Pantai Gesing, Kapanewon Panggang
- b. PPI di Pantai Ngrenahan, Kapanewon Saptosari
- c. PPI di Pantai Baron, Kapanewon Tanjungsari
- d. PPI di Pantai Ngandong, Kapanewon Tanjungsari
- e. PPI di Pantai Drini, Kapanewon Tanjungsari
- f. PPI di Pantai Sundak, Kapanewon Tepus
- g. PPI di Pantai Siung, Kapanewon Tepus
- h. PPI di Pantai Wediombo, Kapanewon GiriSubo

Dalam hal perencanaan kawasan pertambangan, Kapanewon Panggang dan Tepus ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) dengan jenis usaha batu gamping. Kemudian terkait rencana penetapan Kawasan Agroindustri yang meliputi:

- a. Agroindustri Patillo di Kapanewon Tepus
- b. Agroindustri Srikoyo di Kapanewon Tepus
- c. Agroindustri Biofuel di Kapanewon Tepus

Perencanaan penataan kawasan ruang strategis Pantai Selatan Gunungkidul tidak dapat dilepaskan dari aspek pariwisata, sehingga nantinya harus selaras dengan rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata yang tertera dalam RTRW Kabupaten Gunungkidul. kawasan wisata alam di wilayah SRS PANSELA meliputi:

- a. Pantai Gesing di Kapanewon Panggang
- b. Pantai Ngrenahan di Kapanewon Saptosari
- c. Pantai Ngobaran dan Nguyahan di Kapanewon Saptosari
- d. Pantai Baron di Kapanewon Tanjungsari
- e. Pantai Krakal di Kapanewon Tepus
- f. Pantai Sundak dan Pantai Watu Lawang di Kapanewon Tepus
- g. Pantai Drini dan Pantai Sepanjang di Kapanewon Tepus

Secara spesifik Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari ditetapkan sebagai kawasan desa wisata. Sedangkan kalurahan Wonokabaran Kapanewon Panggang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya dan kawasan desa budaya yang terdapat di Desa Kemadang Kapanewon Tanjungsari serta Desa Jerukwudel Kapanewon GiriSubo.

Kawasan wisata minat khusus direncanakan pada beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Kawasan minat khusus Pantai Girijati di Kapanewon Purwosari sebagai kawasan minat khusus terbang layang (gantole)
- b. Kawasan Parangracuk di Kapanewon Saptosari sebagai Kawasan Taman Wisata Teknologi dan pusat studi pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan
- c. Kawasan Pantai Kukup di Kapanewon Tanjungsari sebagai akuarium ekosistem laut, sentra budidaya ikan hias, fasilitas gardu pandang dan konservasi pelestarian alam pantai
- d. Kawasan Pantai Siung di Kapanewon Tepus sebagai kawasan wisata minat khusus panjang tebing dan petualangan
- e. Kawasan Pantai Timang di Kapanewon Tepus sebagai kawasan ekowisata
- f. Kawasan Pantai Wediombo di Kapanewon Tepus sebagai kawasan wisata bersifat petualangan dan wisata minat khusus menyelam serta outbond

- g. Kawasan Sungai Bengawan Solo Purba sebagai kawasan wisata minat khusus keunikan proses geologi

Dalam dokumen RTRW Kab. Gunungkidul, terdapat klasifikasi penetapan Kawasan Strategis yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan SDA atau teknologi tinggi, dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan koridor yang menghubungkan Wonosari-Baron, kawasan koridor Pantai Selatan Kabupaten, dan kawasan tertinggal di Kapanewon Panggang; Purwosari; Girisubo; dan Tepus.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana meliputi kawasan konservasi Goa Arkeologi di Kawasan Karst Gunung Sewu. Sementara itu Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA atau teknologi tinggi terdapat di Kawasan Baron Technopark untuk pengembangan energi terbarukan di Pantai Parangracuk, Kapanewon Saptosari dengan rencana pengembangan kawasan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Kawasan Ekogeowisata Karst di seluruh Kapanewon pada wilayah perencanaan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul
- b. Kawasan konservasi Pantai Wediombo di Kapanewon Girisubo
- c. Kawasan Pelestarian Bengawan Solo Purba di Kapanewon Girisubo
- d. Kawasan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Hutan Tanaman langka Koesnadi Hardjasoemantri di Desa Purwosari, Kapanewon Tepus
- e. Kawasan konservasi di perbatasan Gunungkidul-Bantul.

C. Kebijakan Kebencanaan

Mempertimbangkan peluang kejadian di masa mendatang dan potensi risiko bencana maka diperlukan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif sebagai pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. Memperhatikan hal tersebut pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Proses penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul melibatkan berbagai pihak terkait di skala kabupaten, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media, serta pihak swasta, sehingga diharapkan hasil kajian dapat mengakomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Gunungkidul memberikan landasan, pedoman, dan strategi pengambilan keputusan, masukan untuk RPJMD Kabupaten Gunungkidul, Rencana Strategi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kapanewon dan Desa/Kelurahan di lingkup Kabupaten Gunungkidul serta menjadi rujukan program dan kegiatan dukungan dari pelaku penanggulangan bencana (Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha dan Media Massa).

Perkembangan Jalur Jalan Lintas Selatan, perkembangan teknologi informasi, dan pengembangan wilayah melalui upaya pembangkitan kegiatan pariwisata sebagai pemicu pengembangan ruang telah mengangkat perekonomian di kawasan selatan Kabupaten Gunungkidul. Alih fungsi lahan sebagai sebuah konsekuensi dari kegiatan pembangunan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dan perlu dilakukan penataan agar tidak mengarah pada ketidak sesuain dan pelanggaran tata ruang hingga pada akhirnya dapat memicu meningkatnya kejadian bencana menjadi salah satu fokus prioritas dalam RPB Kabupaten Gunungkidul.

Perlu adanya sebuah pengembangan kebijakan yang lebih mengantisipasi dampak-dampak pembangunan serta menjadi wujud intervensi dalam penataan perkembangan pemanfaatan ruang sebagai bagian dari upaya memberi kepastian hukum dan merangsang partisipasi masyarakat (investor) untuk melakukan pembangunan melalui penanaman modal / investasi di Kabupaten Gunungkidul namun tidak melupakan aspek mitigasi bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul menjadi dasar dalam penyusunan rencana mitigasi termasuk untuk wilayah SRS PANSELA telah merumuskan beberapa program yang dapat menjadi rujukan sebagai pilihan tindak dalam upaya mitigasi bencana yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Program Penanggulangan Bencana
- b. Program Penanganan Bencana
- c. Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
- e. Program Administrasi pemerintahan desa
- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- g. Program Pengembangan Perumahan
- h. Program Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata ruang
- j. Program Perekonomian dan Pembangunan
- k. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- l. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- m. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan
- n. Program pengelolaan persampahan
- o. Program Pengelolaan Sumber daya air
- p. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- q. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- r. Program Perencanaan Lingkungan hidup

BAB IV ANALISIS SITUASI DAN STRATEGI

Penyusunan strategi untuk mitigasi risiko bencana didasari dari analisis situasi yang mencakup (a) evaluasi penanganan risiko bencana di SRS Pansela, (b) kondisi SRS Pansela, (c) identifikasi isu strategis, dan (d) analisis kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan risiko bencana.

Evaluasi Penanganan Risiko Bencana di SRS Pansela

Kabupaten Gunungkidul menerapkan strategi pengurangan risiko bencana secara mandiri dengan memetakan kelembagaan desa, potensi, melestarikan dan memanfaatkan kearifan lokal, menyiapkan sistem peringatan cepat, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi penanganan risiko bencana di Gunungkidul, Yogyakarta, dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi upaya-upaya yang telah dilakukan.

A. Respons Terhadap Bencana

Respons pemerintah dan BPBD serta organisasi lain dalam upaya kebencanaan sangat baik. Terkait dengan masalah kesiapsiagaan bencana, BPBD Kabupaten Gunungkidul tidak bekerja sendiri namun juga dibantu oleh Dinas Sosial melalui program Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana sendiri merupakan program yang dibentuk Kementerian Sosial yang sudah termuat di dalam Permensos Nomor 28 Tahun 2012. Tagana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Di Kabupaten Gunungkidul ada sekitar 226 anggota Tagana yang aktif berperan dalam kegiatan penguatan penanggulangan kesiapsiagaan bencana. Tagana di Kabupaten Gunungkidul juga bersifat edukatif yaitu memberi binaan dan bekal materi tentang kesiapsiagaan kepada komunitas dan pelajar di tingkatan sekolah masing-masing.

B. Sistem Peringatan Dini

Peringatan dini adalah fondasi penting pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat mencegah hilangnya nyawa dan mengurangi dampak ekonomi dan material dari peristiwa berbahaya termasuk bencana. Agar efektif, sistem peringatan dini perlu secara aktif melibatkan orang-orang dan komunitas yang berisiko dari berbagai bahaya, memfasilitasi pendidikan publik dan kesadaran akan risiko, menyebarkan pesan dan peringatan secara efisien dan memastikan bahwa ada keadaan kesiapsiagaan dan tindakan dini yang konstan.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) pada Target global G secara substansial menekankan pentingnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi serta penilaian risiko bencana bagi masyarakat pada tahun 2030. Kemajuan dalam peningkatan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya atau *Multi Hazard Early Warning Systems* (MHEWS) dan informasi dan penilaian risiko bencana kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain dalam penyediaan sistem peringatan dini. Di Tahun 2023, terdapat 7 lokasi yang terpasang EWS tsunami, namun ada 4 lokasi yang rusak yaitu Wediombo, Krakal, Gesing, dan Baron. Dari sisi cakupan pelayanan bencana kebakaran sampai dengan Tahun 2021 belum dapat memenuhi respons time minimal (15 menit). Hal tersebut dikarenakan keberadaan pos PBK yang berada di Kota Wonosari hanya dapat melayani Kota Wonosari dengan radius 7,5 km atau hanya sekitar 6,73% dari total luasan Kabupaten Gunungkidul.

C. Mitigasi Risiko

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 44 telah jelas mengatur bahwa dalam situasi terdapat potensi bencana, upaya mitigasi bencana merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di daerah rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Berbagai upaya mitigasi baik secara struktur maupun non struktural telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan JJLS yang membentang di sepanjang wilayah SRS Pansela akan membawa dampak yang luas terhadap perubahan guna lahan di sekitarnya sehingga ke depan perlu diantisipasi perkembangan area terbangun yang akan muncul. Secara struktural telah banyak dilakukan upaya mitigasi mengingat lokasi jalur JJLS yang berada di zona karst dan tebing yang mudah longsor. Namun permasalahan – permasalahan lain yang mulai timbul dan juga perlu segera diantisipasi adalah terkait perebutan ekosistem antara monyet ekor panjang dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah JJLS.

D. Ketersediaan Sumber Daya

Berdasarkan hasil perhitungan rerata ruang fiskal Kabupaten Gunungkidul adalah 10.12 atau relatif kecil, yang berarti ketersediaan dana yang dapat digunakan “secara bebas” sesuai dengan prioritas daerah relatif terbatas. Optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi efektivitas belanja daerah serta belanja wajib perlu dilakukan untuk menyelaraskan potensi dan prioritas pembangunan. Terkait dengan anggaran kebencanaan pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengalokasikan biaya tidak terduga (BTT) sebagai dana yang dapat digunakan untuk penanganan keadaan darurat bencana.

Keterlibatan pentahelix dalam penanggulangan bencana menjadi hal yang tidak dapat dielakkan lagi, sehingga pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu mendorong keterlibatan para pihak dalam penanganan risiko bencana di SRS Pansela. Keistimewaan SRS pansela sebagai destinasi wisata sudah tentu akan mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya pada sebagian sektor pariwisata di SRS Pansela. Ke depan perlu diatur bagaimana kontribusi para pelaku usaha terhadap upaya – upaya mitigasi yang perlu dilakukan di wilayah SRS Pansela.

E. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Kesadaran warga terhadap bencana dapat dilihat dari kesiapan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan bencana yang terdiri dari beberapa indikator diantaranya adalah intensitas untuk mengikuti dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kesiapsiagaan bencana dan intensitas berdiskusi serta meminta pendapat orang lain untuk membahas kesiapsiagaan bencana.

Warga di pesisir selatan sudah diberikan pelatihan terkait potensi tsunami, dan juga disiapkan jalur evakuasi di beberapa pantai. Dalam membangun Desa Tahan Bencana, masyarakat dijadikan sebagai subyek utama kesiapsiagaan bencana dan aktif dalam semua kegiatan pembangunan dengan pendekatan pada masyarakat untuk mengurangi dampak bencana.

Kolaborasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak/ mitra dalam upaya pengurangan risiko bencana ataupun penanganan kebencanaan, seperti dengan BMKG, NGO, Pemerintah Provinsi DIY dll.

F. Pembaruan Rencana Darurat

Kabupaten Gunungkidul telah memiliki standar pelayanan penanganan darurat bencana di Tahun 2014, dimana melalui standar pelayanan tersebut, masing-masing lembaga akan mengetahui perannya dalam situasi bencana. Pada tahun 2022, Kabupaten Gunungkidul memperkuat lima desa yang memiliki potensi bencana dengan program pembangunan dengan pendekatan pada masyarakat untuk mengurangi dampak bencana. Kelima desa tersebut antara lain Bleberan, Gari, Kemiri, Pringombo, dan Kedungkeris. Program ini memperoleh pembiayaan dari BPBD provinsi (Juliswara, Manik, & Karnadaja, 2022).

G. Isu Kebencanaan dan Pembangunan

Pendalaman terhadap isu kebencanaan dan pembangunan dilakukan melalui literatur review terhadap beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, media massa, *Focus Group Disussion* bersama para stakeholder yang berperan di wilayah SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul serta survei langsung ke lokasi. Berbagai isu dan permasalahan terkait selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama berkaitan dengan komponen utama risiko bencana yang terdiri dari Kerentanan sosial, ekonomi, fisik, lingkungan, pengelolaan tanggap darurat serta partisipasi masyarakat. Pengelompokan isu dan permasalahan terkait kebencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pengelompokan Isu Dan Permasalahan Terkait Kebencanaan

Kelompok Tema	Isu dan Permasalahan
Kerentanan Sosial	Kawasan permukiman yang menyebar dengan kepadatan penduduk rendah
	Solidaritas dan relasi sosial masyarakat Gunungkidul kuat
	Masyarakat tepi pantai Gunung Kidul memiliki etos kerja tinggi,

Kelompok Tema	Isu dan Permasalahan
	memiliki kemampuan bertahan dan beraktivitas di lingkungan dengan ketersediaan sumberdaya air saat musim kemarau
	Persentase <i>dependency ratio</i> sebesar 50,96%
	Penduduk yang tinggal dalam wilayah risiko sebagian besar berkategori prasejahtera
	Masyarakat belum memiliki apresiasi terkait dengan upaya mengembangkan potensi sumberdaya lingkungan yang ada di sekelilingnya. Sementara itu di sisi yang lain arus informasi budaya dari luar sangat kuat sehingga perilaku masyarakat kecenderungan meniru. Hampir semua obyek wisata pantai cenderung dikemas dengan cara yang sama, misalnya masalah kuliner hampir semua makanan dan minuman yang disajikan tidak menggambarkan identitas lokal.
	Sebagian besar cagar budaya belum ditetapkan sebagai cagar budaya, dan implikasinya pada pelestarian dan pemanfaatannya yang belum maksimal.
	Terdapat 1.457 penduduk disabilitas yang terpapar bencana gempa bumi dan kekeringan, 432 penduduk disabilitas terpapar bencana tanah longsor, dan 14 penduduk disabilitas terpapar bencana gempa bumi
	Rasio jenis kelamin di Kawasan SRS Pansela Gunungkidul mencapai 96,63
	Masih terdapat sekitar 17,69% masyarakat Gunungkidul yang termasuk dalam penduduk miskin
	Adanya konflik pengelolaan parkir di beberapa lokasi pantai.
	Masyarakat yang ada di sekitar SRS Pansela memiliki kegiatan yang beragam
	Tanaman budidaya dan hewan ternak yang dikembangkan memiliki nilai ekonomis.
	Kawasan permukiman dan infrastruktur umum sebagian berada di lokasi rawan bencana, seperti gempa
	Desain bangunan permukiman penduduk belum sepenuhnya tahan terhadap gempa
	Adanya biaya operasional yang tinggi untuk irigasi sumur pompa bagi rumah-rumah di sekitar pansela. Air Tanah sangat dalam, lebih dari 25 m
	Infrastruktur air bersih di Kawasan pansela masih terbatas
Kerentanan Fisik	Sebagian besar wilayah bentukan dari lahan karst dan struktural. Berupa perbukitan karst, dataran tinggi karst, lembah karst dan dataran aluvial karst, sedangkan bentukan strukturalnya berupa pegunungan struktural dan perbukitan struktural yang terisolasi sehingga banyak titik pantai yang belum dikembangkan karena lokasinya yang sulit dijangkau, terkendala keberadaan bukit-bukit karst untuk membuka akses jalan.
	Kondisi tanah yang labil, karena jenis batuan penyusunnya berupa batuan kapur/karst, kemiringan permukaan tanah di atas 30° besarnya kekar tanah dan kontur tanah
	Lahan yang diusahakan sebagai lahan pertanian tanaman pangan sangat terbatas (< 30%)
	Infrastruktur yang belum sepenuhnya berbasis pengarusutamaan

Kelompok Tema	Isu dan Permasalahan
	kebencanaan
	Potensi longsoran tebing yang dapat menghambat pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata di kawasan pansela
	Sebagian pantai berbentuk teluk yang menghadap langsung ke laut lepas
	Perubahan iklim global yang memicu pergerakan angin kencang dan cuaca ekstrem
Kerentanan Lingkungan	Jumlah penduduk di wilayah SRS Pansela adalah 210.490 dengan aktivitas masyarakat yang sangat beragam dan cukup tinggi sehingga kebutuhan air meningkat.
	Keterbatasan ketersediaan sumber air permukaan serta jenis tanah yang mempunyai porositas tinggi sehingga tidak dapat menyimpan air terlalu lama padahal Kebutuhan air meningkat
	Alih fungsi lahan tanpa memperhatikan dampak lingkungan
	Banyaknya kerusakan lahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup, ditandai dengan tingginya persentase karang mati, menurunnya keanekaragaman hayati, dan hilangnya habitat satwa tertentu.
	Vegetasi di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semakin berkurang
	Belum ada pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada pantai selatan.
	Volume sampah yang ada di Kawasan pansela GK sebesar 917,12 ton di tahun 2022 (DLH Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022) dan belum ada manajemen pengelolaan sampah yang baik.
Pengelolaan Tanggap Darurat	Kabupaten Gunungkidul telah memiliki dokumen kebencanaan yang selalu diperbaharui
	Bappeda Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi
	Frekuensi dan lokasi bencana gempa bumi yang sulit diprediksi namun, seringkali pusat gempa berada di Samudera Indonesia
	Informasi evakuasi di kawasan pansela Gunungkidul belum optimal mencakup zona inundasi tsunami atau zona yang tergenang oleh tsunami, titik aman evakuasi, titik berkumpul, serta jalur evakuasi pada kawasan pantai.
	Penataan ruang di kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul perlu memperhatikan perencanaan tata ruang berbasis bencana. Pemanfaatan tata ruang yang ada inkonsisten dengan regulasi yang berlaku
	Jalur transportasi/jalan yang berkelok, naik turun dengan tebing dan jurang curam sehingga rawan terjadi kecelakaan, selain itu, belum semua wilayah pansela memiliki jalur jalan yang baik
	Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana masih belum memadai
	Kawasan permukiman, wisata dan perdagangan berada di dekat pesisir pantai. Belum adanya aturan yang jelas dalam batasan pembangunan dari bibir tebing di zona sempadan pantai
Partisipasi Masyarakat	Terdapat 42 sekolah yang telah menerapkan SPAB di Kawasan Gunungkidul

Kelompok Tema	Isu dan Permasalahan
	Dari 33 Kalurahan yang ada di wilayah Satuan Ruang Strategis Pansela 27 Kalurahan telah ditetapkan sebagai Kalurahan tangguh bencana
	Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih berada pada kategori sedang

H. Analisis Alternatif Solusi Penanganan Risiko Bencana

Matriks diturunkan dari model Analisis SWOT dari analisis eksternal-internal untuk mengidentifikasi solusi sebagai strategi gabungan untuk menentukan program –program mitigasi bencana yang perlu dilakukan di wilayah Satuan Ruang Strategis Pansela. Empat kategori matriks SWOT disusun berdasarkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Menggunakan matriks SWOT diperoleh strategi yang terbagi dalam beberapa kategori:

Kategori 1: Hasil analisis SO (kekuatan–peluang) merupakan strategi maxi-maxi yang didalamnya terdapat kekuatan digunakan untuk memaksimalkan.

Kategori 2 : Hasil analisis WO (kelemahan–peluang) sebagai strategi mini-maxi dimana kelemahan yang ada diminimalkan dengan memanfaatkan peluang.

Kategori 3 : Hasil analisis ST (kekuatan-ancaman) sebagai strategi maxi-mini yaitu kekuatan mana yang digunakan untuk meminimalkan ancaman.

Kategori 4 : Hasil analisis WT (kelemahan–ancaman) sebagai strategi mini-mini yang menghindari kelemahan dan ancaman.

Berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat hasil analisis isu dengan menggunakan teknis analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.2, hingga Tabel 4.7.

Tabel 4.2. Tabel Analisis SWOT – Kerentanan Sosial

	Kelebihan	Kekurangan
	- Kawasan permukiman yang menyebar dengan kepadatan penduduk rendah - Solidaritas dan relasi sosial masyarakat Gunungkidul kuat - Masyarakat tepi pantai Gunung Kidul memiliki etos kerja tinggi, memiliki kemampuan bertahan dan beraktivitas di lingkungan dengan ketersediaan sumberdaya air bersih yang langka - Persentase dependency ratio sebesar 50,96%	- Penduduk yang tinggal dalam wilayah risiko bencana sebagian besar berkategori prasejahtera - Masyarakat belum memiliki apresiasi terkait dengan upaya mengembangkan potensi sumberdaya lingkungan yang ada di sekelilingnya - Pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya yang belum maksimal. - Terdapat 1.457 penduduk disabilitas yang terpapar bencana gempa bumi dan kekeringan, 432 penduduk disabilitas terpapar bencana tanah longsor, dan 14 penduduk disabilitas terpapar bencana gempa bumi - Rasio jenis kelamin di Kawasan SRS Pansel Gunungkidul mencapai 96,63 - Masih terdapat sekitar 17,69% masyarakat Gunungkidul yang termasuk dalam penduduk miskin - Adanya konflik pengelolaan parkir di

		beberapa lokasi pantai.
Peluang	Analisis S-O	Analisis W-O
Pengembangan budaya sadar bencana yang dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak (pentahelix dan/atau multihelix)	• Penguatan kebiasaan sadar bencana bagi masyarakat • Penguatan budaya sadar bencana bagi masyarakat di Kawasan SRS Pansela dengan mengintegrasikan konsep <i>sister village</i>	• Optimalisasi kerjasama pentahelix dalam bidang kebencanaan, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pengetahuan kebencanaan • Penguatan kapasitas kebencanaan bagi masyarakat di sekitar SRS Pansela • Pengembangan sistem pendataan kelompok rentan yang <i>real-time</i> • Optimalisasi perlindungan terhadap kelompok rentan
Tantangan	Analisis S-T	Analisis W-T
• Perubahan perilaku dan tatanan kehidupan masyarakat pada era • Arus informasi budaya dari luar sangat kuat sehingga perilaku masyarakat kecenderungan meniru globalisasi.	• Penguatan kearifan lokal terkait budaya yang ada di sekitar SRS Pansela • Peningkatan status ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang padat karya	• Pengembangan destana/kaltana berbasis kearifan lokal • Penguatan satuan gugus tugas bencana, khususnya di kawasan rawan bencana

Tabel 4.3. Tabel Analisis SWOT– Kerentanan Ekonomi

	Kelebihan	Kekurangan
	• Masyarakat yang ada di sekitar SRS Pansela memiliki kegiatan yang beragam • Tanaman budidaya dan hewan ternak yang dikembangkan memiliki nilai ekonomis.	• Kawasan permukiman dan infrastruktur umum sebagian berada di lokasi rawan bencana, seperti gempa • Desain bangunan permukiman penduduk belum sepenuhnya tahan terhadap gempa • Adanya biaya operasional yang tinggi untuk irigasi sumur pompa bagi rumah-rumah di sekitar pansela • Infrastruktur air bersih di Kawasan pansela masih terbatas
Peluang	Analisis S-O	Analisis W-O
• Minat wisatawan yang mengarah pada wisata alam ekstrem • Adanya kebijakan pengelolaan	• Penguatan manajemen wisata berbasis kebencanaan • Pembangunan infrastruktur air untuk mendukung sektor pertanian	• Relokasi permukiman di zona rawan bencana • Perkuatan (<i>retrofitting</i>) bangunan dan konstruksi sarana dan prasarana tahan bencana • Ekspansi promosi wisata alam melalui berbagai media sosial

irigasi partisipatif		
Tantangan	Analisis S-T	Analisis W-T
- Banyaknya wisata alam yang baru dikembangkan dengan berbagai atraksinya - Tersedianya berbagai lembaga yang berfokus pada kebencanaan	- Penguatan manajemen wisata berbasis kebencanaan - Optimalisasi kerjasama perekonomian	- Pengembangan pusat-pusat aktivitas perekonomian perdesaan di kawasan pesisir yang berbasis pada komunitas - Pengembangan objek wisata yang mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal dan sinergi antara satu objek wisata dengan objek wisata lain

Tabel 4.4. Tabel Analisis SWOT– Kerentanan Fisik

	Kelebihan	Kekurangan
	Sebagian besar wilayah bentukan dari lahan karst dan struktural. Berupa perbukitan karst, dataran tinggi karst, lembah karst dan dataran aluvial karst, sedangkan bentukan strukturalnya berupa pegunungan struktural dan perbukitan struktural yang terisolasi sehingga banyak titik pantai	- Kondisi tanah yang labil, karena jenis batuan penyusunnya berupa batuan kapur/karst - Lahan yang diusahakan sebagai lahan pertanian tanaman pangan sangat terbatas (< 30%) - Infrastruktur yang belum sepenuhnya berbasis pengarusutamaan kebencanaan - Potensi longsor dan tebing yang dapat menghambat pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata di kawasan pangsela - Sebagian pantai berbentuk teluk yang menghadap langsung ke laut lepas - Perubahan iklim global yang memicu pergerakan angin kencang
Peluang	Analisis S-O	Analisis W-O
Pembangunan JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan)	Optimalisasi pengembangan wisata dengan tetap menjaga keaslian kondisi wilayahnya Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang yang telah ada	Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana Kolaborasi pemanfaatan ruang dengan wilayah yang berbatasan langsung
Tantangan	Analisis S-T	Analisis W-T
Alih fungsi lahan yang semakin masif terjadi di sekitar pangsela	- Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan/kebijakan - Pemulihan fungsi ruang sesuai dengan aturan/kebijakan	Penertiban pemanfaatan ruang non-formal

Tabel 4.5. Tabel Analisis SWOT– Kerentanan Lingkungan

	Kelebihan	Kekurangan
	Jumlah penduduk di wilayah SRS Pansela adalah 210.490 (BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023) dengan aktivitas masyarakat yang sangat beragam dan cukup tinggi	• Keterbatasan ketersediaan sumber air permukaan serta jenis tanah yang mempunyai porositas tinggi sehingga tidak dapat menyimpan air terlalu lama • Kebutuhan air meningkat • Alih fungsi lahan tanpa memperhatikan dampak lingkungan • Banyaknya kerusakan lahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup • Vegetasi di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semakin berkurang • Belum ada pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di pansela. • Volume sampah yang ada di Kawasan pansela GK sebesar 917,12 ton di tahun 2022 (DLH Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022) dan belum ada manajemen pengelolaan sampah yang baik.
Peluang	Analisis S-O	Analisis W-O
• Keanekaragaman daya tarik wisata menjadikan destinasi wisata layak dikunjungi oleh berbagai usia, dan dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi • Investasi terbuka bagi investor yang bergerak di bidang pariwisata	• Pengembangan wisata edukasi kebencanaan • Penguatan investasi bidang pariwisata berbasis risiko bencana yang ada di wilayah tersebut	Pengendalian kawasan perlindungan setempat secara optimal.
Tantangan	Analisis S-T	Analisis W-T
Kerusakan ekosistem pantai dan pesisir akibat eksploitasi wisata berlebihan (RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030)	Optimalisasi pengelolaan lingkungan di kawasan rawan bencana	Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dengan pelestarian habitat dan ekosistem khusus dengan konsep berkelanjutan.

Tabel 4.6. Tabel Analisis SWOT- Pengelolaan Tanggap Darurat

	Kelebihan	Kekurangan
	• Kabupaten Gunungkidul telah memiliki dokumen kebencanaan yang selalu diperbaharui • Bappeda Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi	• Frekuensi dan lokasi bencana gempa bumi yang sulit diprediksi namun, seringkali pusat gempa berada di Samudera Indonesia • Informasi evakuasi di kawasan pangsela Gunungkidul belum optimal • Pemanfaatan tata ruang yang ada inkonsisten dengan regulasi yang berlaku • Jalur transportasi/jalan yang berkelok, naik turun dengan tebing dan jurang curam sehingga rawan terjadi kecelakaan, selain itu, belum semua wilayah pangsela memiliki jalur jalan yang baik • Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana masih belum memadai • Belum adanya aturan yang jelas dalam batasan pembangunan dari bibir tebing di zona sempadan pantai
Peluang	Analisis S-O	Analisis W-O
• Integrasi aspek kebencanaan dalam kebijakan pembangunan wilayah • Integrasi aspek kebencanaan dalam anggaran di setiap stakeholders	• Pembaharuan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk semua risiko bencana yang ada di SRS Pangsela • Optimalisasi peran satuan gugus tugas bencana • Penyusunan dan Sinkronisasi dasar hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.	• Penguatan komitmen pengarusutamaan kebencanaan dalam perencanaan dan penganggaran daerah • Pengoptimalan perencanaan pada setiap penanggulangan bencana untuk menurunkan kerentanan daerah. • Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. • Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana • Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif kebencanaan
Tantangan	Analisis S-T	Analisis W-T
• Banyaknya masyarakat yang berasal dari luar Gunungkidul yang memiliki keinginan untuk berinvestasi • Sulitnya mendeteksi beberapa kejadian bencana	• Memantapkan kesiapan penanganan darurat bencana. • Pemahaman risiko yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal • Penyiapan dan pemasangan sistem peringatan dini (<i>early warning</i>) dengan konsep keterlibatan masyarakat sehingga meningkatkan <i>sense of belonging</i>	• Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana. • Penguatan peran utama lembaga kebencanaan sehingga saat situasi bencana tidak terjadi dual-informasi

Tabel 4.7. Tabel Analisis SWOT– Partisipasi Masyarakat

	Kelebihan	Kekurangan
	• Terdapat 42 sekolah yang telah menerapkan SPAB di Kawasan Gunungkidul • Sudah terdapat 85 destana/Kaltana (59,03%) yang terbentuk di Kawasan pansela	• Sekitar 40,97% desa/kalurahan yang belum memiliki destana/kaltana • Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih berada pada kategori sedang
Peluang	Analisis S-O	Analisis W-O
Kemendikbud memiliki program untuk mendukung ketahanan siswa dalam menghadapi bencana	• Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana. • Internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan, dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi. •	• Optimalisasi kerjasama antar lembaga kebencanaan dan sekolah dalam pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan kebencanaan • Penguatan simulasi kebencanaan pada sektor pendidikan
Tantangan	Analisis S-T	Analisis W-T
Stigma masyarakat yang menekankan bahwa perempuan tidak perlu dilibatkan dalam kegiatan kebencanaan	• Pengembangan sistem komunikasi informasi berbasis komunitas, seperti radio komunitas • Optimalisasi peran perempuan dalam aspek kebencanaan, khususnya di dalam keluarga	• Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat

I. Analisis Penentuan Strategi Prioritas

Analisis penentuan prioritas disusun dengan menggunakan penilaian AHP untuk membantu menentukan tingkat prioritas berdasarkan pilihan dan pendapat para ahli (*stakeholder*) terkait di Kabupaten Gunungkidul. Penilaian AHP penentuan strategi prioritas dilakukan dengan memberikan kuesioner berpasangan kepada para tim Kebencanaan Kabupaten Gunungkidul dan tim penyusun yang berjumlah 18 orang, profil kelompok ahli yang memberikan respons dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Profil Kelompok ahli dalam analisis AHP penentuan Strategi prioritas penanganan risiko bencana SRS Panseja

Jumlah	Kelompok ahli	Keahlian
1	Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat
3	TataRuang	Penggunaanlahan
2	Perencanaan wilayah	Kebijakan perencanaan wilayah
3	Manajemen bencana	Manajemen bencana
1	Lingkungan hidup	Manajemen lingkungan
2	Pariwisata	Pengelolaan pariwisata
1	Pendidikan	Pendidikan
2	Kesehatan	Pengelolaan kesehatan masyarakat
2	Sosial Ekonomi	Industri dan pemberdayaan masyarakat
1	Kepolisian	Keamanan dan perlindungan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Mekanisme penentuan prioritas dilakukan dengan memberikan penilaian pada kuesioner berpasangan yang disusun menggunakan sembilan poin untuk memperoleh skala rasio agar didapatkan keputusan – keputusan multikriteria yang memungkinkan mencapai keputusan umum mengenai strategi penanganan risiko bencana di wilayah SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul. Pertimbangan yang digunakan dalam analisis prioritas adalah pemecahan permasalahan berdasarkan kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan lingkungan, pengelolaan tanggap darurat, dan partisipasi masyarakat.

J. Strategi Penanganan Berdasarkan Kerentanan Ekonomi

Hasil analisis AHP yang telah dilakukan menunjukkan beberapa strategi memiliki pengaruh yang dominan. Berikut adalah hasil dari AHP untuk penanganan berdasarkan Kerentanan Ekonomi yang disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9.Prioritas Kerentanan Ekonomi

No.	Pernyataan strategi	Priority Index	Tingkat Prioritas
1.	Penguatan wisata berbasis kebencanaan	0,046	8
2.	Pembangunan infrastruktur air	0,067	6
3.	Relokasi permukiman di zona rawan bencana	0,06	7
4.	Perkuatan (retrofitting) bangunan dan konstruksi sarana dan prasarana tahan bencana	0,107	5
5.	Ekspansi promosi wisata alam melalui berbagai media sosial	0,045	9
6.	Optimalisasi kerjasama perekonomian	0,143	3
7.	Penguatan manajemen wisata berbasis kebencanaan	0,116	4
8.	Pengembangan pusat-pusat aktivitas perekonomian perdesaan	0,175	2
9.	Pengembangan objek wisata yang mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal dan sinergi antara satu objek wisata dengan objek wisata lain	0,24	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.9 prioritas tertinggi yang memiliki pengaruh pengurangan risiko terbesar adalah strategi ‘Pengembangan objek wisata yang mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal dan sinergi antara satu objek wisata dengan objek wisata lain’. Nilai ini memiliki nilai *Consistency Ratio* (CR) sebesar 0,08. Perbedaan pengaruh akan sangat terlihat bila disajikan pada gambar seperti pada Gambar 4.1. Berdasarkan hal tersebut maka strategi penanganan bencana di wilayah SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul lebih diutamakan pada pengembangan objek wisata yang mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal dan sinergi. Pengintegrasian jalur kawasan wisata dapat dilakukan dengan cara pembangunan jalan sejalur pada pantai-pantai yang berdekatan, dan penyelarasan antara satu objek wisata dengan objek wisata lainnya terkait perekonomian. Pengembangan jalur kawasan objek wisata yang terintegrasi secara optimal dan sinergi antara satu objek wisata dengan objek wisata lain memberikan kemudahan akses serta dapat menyebarkan pengunjung pada satu objek wisata. Kondisi ini akan berdampak pada perekonomian sehingga mengurangi tingkat kerentanan perekonomian.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memprioritaskan pada strategi tersebut terlebih dahulu dibandingkan dengan strategi lainnya. Ekspansi promosi wisata alam melalui berbagai media sosial memiliki tingkat prioritas yang rendah sehingga, tidak menjadi prioritas dalam upaya penanganan risiko bencana di SRS Pansela Gunungkidul. Hal tersebut dikarenakan informasi di media sosial sudah sangat banyak, masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh informasi tersebut dari berbagai media sosial yang dimiliki oleh perorangan ataupun kelompok.



Gambar 4.1. Grafik Penilaian Strategi Penanganan Bencana Berdasarkan Kerentanan Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis, 2023.

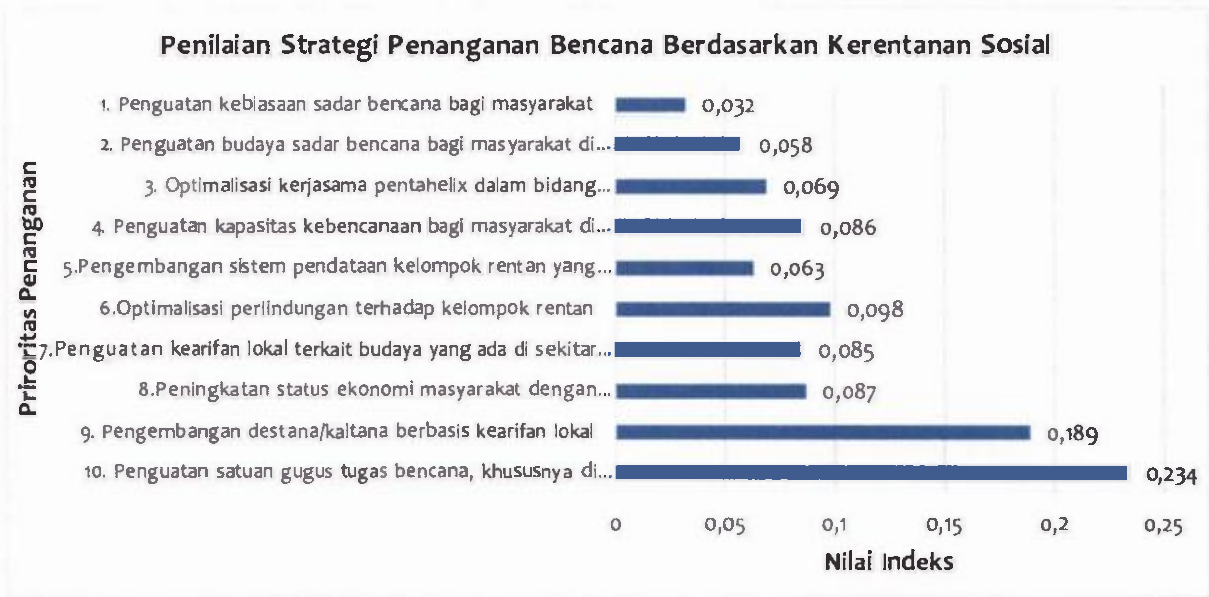
K. Strategi Penanganan Berdasarkan Kerentanan Sosial

Kondisi sosial masyarakat di Kawasan SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul dijadikan pula sebagai dasar analisis. Berikut adalah hasil dari AHP untuk penanganan berdasarkan kerentanan sosial yang disajikan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Prioritas Kerentanan Sosial

No.	Pernyataan strategi	Priority Index	Tingkat Prioritas
1.	Penguatan kebiasaan sadar bencana bagi masyarakat	0,032	10
2.	Penguatan budaya sadar bencana bagi masyarakat di Kawasan SRS Pansela dengan mengintegrasikan konsep sister village	0,058	9
3.	Optimalisasi kerjasama pentahelix dalam bidang kebencanaan, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pengetahuan kebencanaan	0,069	7
4.	Penguatan kapasitas kebencanaan bagi masyarakat di sekitar SRS Pansela	0,086	4
5.	Pengembangan sistem pendataan kelompok rentan yang real-time	0,063	8
6.	Optimalisasi perlindungan terhadap kelompok rentan	0,098	3
7.	Penguatan kearifan lokal terkait budaya yang ada di sekitar SRS Pansela	0,085	5
8.	Peningkatan status ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang padat karya	0,087	6
9.	Pengembangan destana/kaltana berbasis kearifan lokal	0,189	2
10.	Penguatan satuan gugus tugas bencana, khususnya di kawasan rawan bencana	0,234	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023.



Gambar 0.2. Grafik Penilaian Strategi Penanganan Bencana Berdasarkan Kerentanan Sosial

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.10 dan Gambar 4.2, diketahui bahwa nilai konsistensi ratio/ *consistency ratio* (CR) sebesar 0,09 dengan prioritas tertinggi pada strategi 'Penguatan satuan gugus tugas bencana, khususnya di kawasan rawan bencana'. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memprioritaskan pada strategi tersebut terlebih dahulu dibandingkan dengan strategi lainnya. Penguatan kebiasaan sadar bencana bagi masyarakat memiliki tingkat prioritas yang rendah sehingga, tidak menjadi prioritas dalam upaya penanganan risiko bencana di SRS Pansela Gunungkidul. Hal tersebut dikarenakan kegiatan peningkatan sadar bencana sudah dilakukan sejak lama oleh pemerintah dan masyarakat di Gunungkidul, hal tersebut juga umumnya dilakukan pada upaya mitigasi bencana dan dapat diintegrasikan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.

L. Analisis Kerentanan Fisik

Kondisi fisik di Kawasan SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul dijadikan pula sebagai dasar analisis penanganan risiko bencana. Berikut adalah hasil dari AHP untuk penanganan berdasarkan kerentanan fisik yang disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Prioritas Kerentanan Fisik

No.	Pernyataan Strategi	Priority Index	Tingkat Prioritas
1.	Optimalisasi pengembangan wisata dengan tetap menjaga keaslian kondisi wilayahnya	0,044	7
2.	Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang yang telah ada	0,053	6
3.	Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana	0,069	5
4.	Kolaborasi pemanfaatan ruang dengan wilayah yang berbatasan langsung	0,081	4
5.	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan	0,237	3
6.	Pemulihan fungsi ruang sesuai dengan aturan	0,272	1
7.	Penertiban pemanfaatan ruang non-formal	0,244	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 4.3. Grafik Penilaian Strategi Penanganan Bencana Berdasarkan Kerentanan Fisik

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai konsistensi ratio/ *consistency ratio* (CR) sebesar 0,08 dengan prioritas tertinggi pada strategi 'Pemulihan fungsi ruang sesuai dengan aturan/kebijakan'. Begitu pula pada grafik dalam Gambar 4.3. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memprioritaskan pada strategi tersebut terlebih dahulu dibandingkan dengan strategi lainnya. Optimalisasi pengembangan wisata dengan tetap menjaga keaslian kondisi wilayahnya memiliki tingkat prioritas yang rendah sehingga, tidak menjadi prioritas dalam upaya penanganan risiko bencana di SRS Pansela Gunungkidul.

M. Analisis Kerentanan Lingkungan

Kondisi lingkungan di Kawasan SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul dijadikan pula sebagai dasar analisis. Berikut adalah hasil dari AHP untuk penanganan berdasarkan kerentanan lingkungan yang disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Prioritas Kerentanan Lingkungan

No.	Pernyataan strategi	Priority Index	Tingkat Prioritas
1.	Pengembangan wisata edukasi kebencanaan	0,038	5
2.	Penguatan investasi bidang pariwisata berbasis risiko bencana yang ada di wilayah tersebut	0,078	4
3.	Pengendalian kawasan perlindungan setempat secara optimal.	0,137	3
4.	Optimalisasi pengelolaan lingkungan di kawasan rawan bencana	0,279	2
5.	Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dengan pelestarian habitat dan ekosistem khusus dengan konsep berkelanjutan.	0,469	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023.



Gambar 4.4. Grafik Penilaian Strategi Penanganan Bencana Berdasarkan Kerentanan Lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut, diketahui bahwa nilai konsistensi ratio/ *consistency ratio* (CR) sebesar 0,18 dengan prioritas tertinggi pada strategi 'Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dengan pelestarian habitat dan ekosistem khusus dengan konsep berkelanjutan'. Begitu pula dengan grafik pada Gambar 4.4. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memprioritaskan pada strategi tersebut terlebih dahulu dibandingkan dengan strategi lainnya. Pengembangan wisata edukasi kebencanaan memiliki tingkat prioritas yang rendah sehingga, tidak menjadi prioritas dalam upaya penanganan risiko bencana di SRS Pansela Gunungkidul.

Analisis Pengelolaan Tanggap Darurat

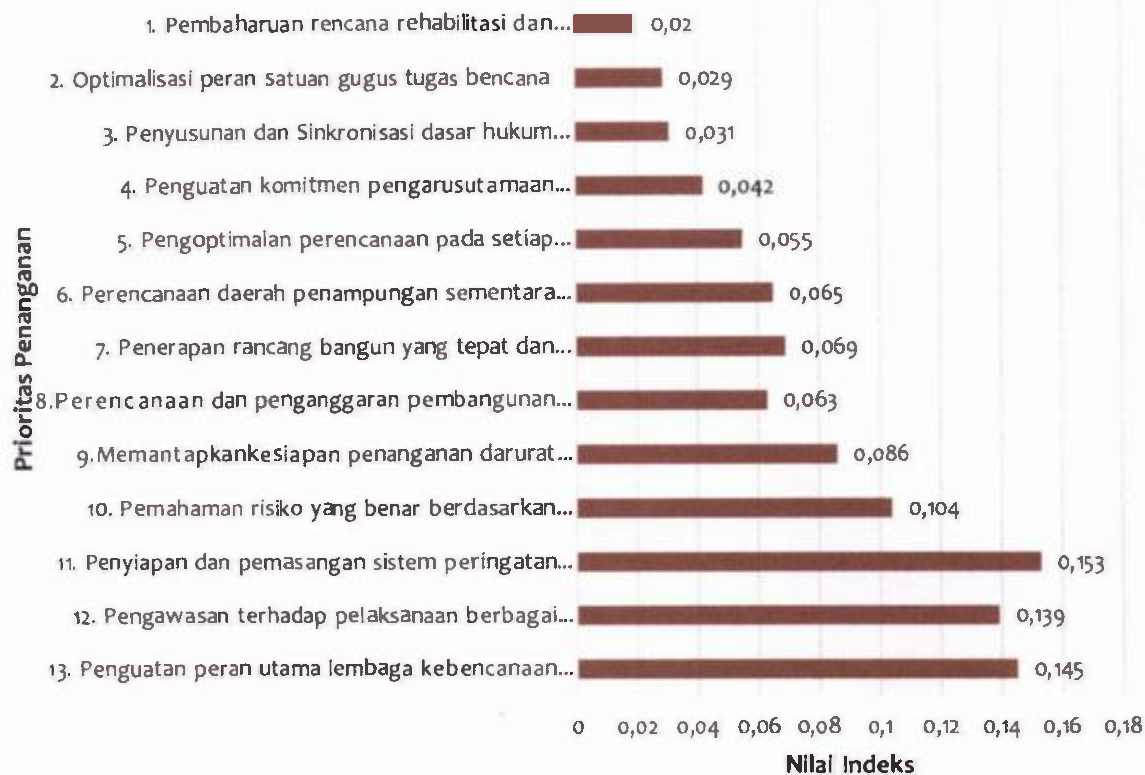
Kondisi pengelolaan tanggap darurat di Kawasan SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul dijadikan pula sebagai dasar analisis. Berikut adalah hasil dari AHP untuk penanganan berdasarkan pengelolaan tanggap darurat yang disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Prioritas Pengelolaan Tanggap Darurat

No.	Pernyataan strategi	Priority Index	Tingkat Prioritas
1.	Pembaharuan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk semua risiko bencana yang ada di SRS Pansela	0,020	13
2.	Optimalisasi peran satuan gugus tugas bencana	0,029	12
3.	Penyusunan dan Sinkronisasi dasar hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.	0,031	11
4.	Penguatan komitmen pengarusutamaan kebencanaan dalam perencanaan dan penganggaran daerah	0,042	10
5.	Pengoptimalan perencanaan pada setiap penanggulangan bencana untuk menurunkan kerentanan daerah.	0,055	9
6.	Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.	0,065	7
7.	Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana	0,069	6
8.	Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif kebencanaan	0,063	8
9.	Memantapkan kesiapan penanganan darurat bencana.	0,086	5
10.	Pemahaman risiko yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal	0,104	4
11.	Penyiapan dan pemasangan sistem peringatan dini (<i>early warning</i>) dengan konsep keterlibatan masyarakat sehingga meningkatkan <i>sense of belonging</i>	0,153	1
12.	Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.	0,139	3
13.	Penguatan peran utama lembaga kebencanaan sehingga saat situasi bencana tidak terjadi dual-informasi	0,145	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penilaian Strategi Penanganan Bencana Berdasarkan Pengelolaan Tanggap Darurat



Gambar 4.5. Grafik Penilaian Strategi Penanganan Bencana Berdasarkan Pengelolaan Tanggap Darurat
Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.13 dan Gambar 4.5, diketahui bahwa nilai konsistensi ratio/ *consistency ratio* (CR) sebesar 0.09 dengan prioritas tertinggi pada strategi 'Penyiapan dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning*) dengan konsep keterlibatan masyarakat sehingga meningkatkan sense of belonging'. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memprioritaskan pada strategi tersebut terlebih dahulu dibandingkan dengan strategi lainnya. Pembaharuan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk semua risiko bencana yang ada di SRS Pansela memiliki tingkat prioritas yang rendah sehingga, tidak menjadi prioritas dalam upaya penanganan risiko bencana di SRS Pansela Gunungkidul.

N. Analisis Partisipasi Masyarakat

Kondisi partisipasi masyarakat di Kawasan SRS Pansela Kabupaten Gunungkidul dijadikan pula sebagai dasar analisis. Berikut adalah hasil dari AHP untuk penanganan berdasarkan partisipasi masyarakat yang disajikan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Prioritas Partisipasi Masyarakat

No.	Pernyataan strategi	Priority Index	Tingkat Prioritas
1.	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana	0,097	6
2.	Internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan, dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi	0,096	7
3.	Optimalisasi kerjasama antar lembaga kebencanaan dan sekolah dalam pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan kebencanaan	0,110	4
4.	Penguatan simulasi kebencanaan pada sektor pendidikan	0,107	5
5.	Pengembangan sistem komunikasi informasi berbasis komunitas, seperti radio komunitas	0,165	3
6.	Optimalisasi peran perempuan dalam aspek kebencanaan, khususnya di dalam keluarga	0,166	2
7.	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat	0,259	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023.



Gambar 4.6. Grafik Penilaian Strategi Penanganan Bencana Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.14 dan Gambar 4.6, diketahui bahwa nilai konsistensi ratio/ *consistency ratio* (CR) sebesar 0.03 dengan prioritas tertinggi pada strategi 'Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat'. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memprioritaskan pada strategi tersebut terlebih dahulu dibandingkan dengan strategi lainnya. Internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan, dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi memiliki tingkat prioritas yang rendah sehingga, tidak menjadi prioritas dalam upaya penanganan risiko bencana di SRS Pansela Gunungkidul.

BABV
Matrik Aksi Mitigasi

Prioritas aksi merupakan upaya utama yang dapat dilakukan guna mengurangi risiko bencana yang dapat terjadi di suatu kawasan. Untuk memastikan strategi prioritas yang telah ditetapkan dapat tercapai pada seluruh prioritas dirumuskan rencana penanganan risiko bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. Strategi ini dimaksudkan untuk penanganan kebencanaan yang lebih terarah dan komprehensif.

Tabel 5.1. Strategi Penanganan Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul.

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
1.	Pengembangan objek wisata yang mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal dan sinergi antara satu objek wisata dengan objek wisata lain dengan mempertimbangkan penanganan risiko bencana	Pemasangan rambu-rambu peringatan bencana dan petunjuk evakuasi						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		Penyediaan tempat evakuasi sementara dan evakuasi akhir di tempat wisata						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Pembangunan dinding penahan longsor pada daerah rawan						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		longsor di sepanjang jalur wisata							pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Pembangunan dan pengelolaan Tempat Evakuasi Bencana Tsunami dan Gelombang Ekstrem dan Abrasi						Balong, Jepitu, Songbanyu, Pucung, Tileng, Girikarto, Giriwungu, Giricahyo, Girijati, Giripurwo, Kanigoro, Krambilsawit, Banjarejo, Kemadang, Ngestirejo, Purwodadi, Sidoharjo, Tepus	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Pengelolaan Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Gempabumi, dan Tanah Longsor						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Penyelerasan terkait dengan regulasi tata ruang sepadan pantai dan pesisir, pariwisata dan pengurangan risiko bencana						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Sosialisasi dan simulasi penanganan bencana						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Penetapan dan perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata						Sundak, Pulangsawal, Siung, Wediombo, Jungwok, Sadeng, Nguyahan, Ngobaran, Ngrenahan, Baron, Kukup, Krakal, Drini, Sepanjang, Timang, Gesing, Grigak, Ngungguh, Nampu, Wohduku	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata,
		Penataan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata						Jepitu, Girisubo, Ngloro, Kemiri, Kemadang, Kanigoro, Parangrejo, Girisekar, Girimulyo, Giricahyo, Giripurwo,	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		Penyediaan penerangan jalan yang memadai untuk akses jalan yang baru dibangun.						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional						Panggang	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		Peningkatan Integrasi yang terarah antara organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul						Seluruh wilayah SRS	Seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		terkait upaya penanganan bencana di daerahnya terutama di wilayah SRS Pansela Gunungkidul.							
2	Pengembangan pusat-pusat aktivitas perekonomian perkalurahan yang berbasis pada penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana	Penciptaan iklim kondusif untuk investasi						Perkotaan Saptosari	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan perkotaan skala lokal						Perkotaan Saptosari	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
		Pengembangan fungsi pengumpul pertanian						Perkotaan Panggang, Purwosari, Tanjungsari, Girisubo,	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian,

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Pengembangan fungsi pengumpul perikanan						Kapenewon Tepus	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
		Edukasi terkait peningkatan kreativitas dan ide-ide baru pada usaha kecil menengah sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang.						Girijati, Giricahyo, Giripurwo Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro,Planjan Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo Sidorehi, Tepus, Purwodadi Balong, Jepitu, Tileng, Pucung Songbanyu	Perangkat daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, Perangkat daerah Yang menyelenggarakan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									an urusan pemerintahan bidang Perdagangan
		Pengintegrasian antara Kalurahan Maritim dengan Kalurahan Tangguh Bencana						Girijati, Giricahyo, Giripurwo, Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro,Planjan Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidorehi, Tepus, Purwodadi Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu	Perangkat daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan k�tertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial P3A
3.	Optimalisasi kerjasama perekonomian lintas sektor di kawasan SRS Pansela	Pelibatan pemangku masyarakat dan masyarakat sekitar dalam pengembangan hotel hingga wisata baru dari mulai dibangun hingga dioperasikan.						Pantai Sadeng (Girisubo), Pantai Gesing (Panggang),	Perangkat daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
		Penyusunan Rencana Pengembangan menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara						Pantai Sadeng (Girisubo)	Perangkat daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)						Pantai Gesing (Panggang)	Perangkat daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									bidang Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)						Pantai Ngrenehan (Saptosari), Pantai Baron (Tanjungsari), Pantai Drini (Tanjungsari), Pantai Ngandong (Tanjungsari), Pantai Siung (Tepus), Pantai Nampu (Girisubo)	Perangkat daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Prasarana Sumberdaya Energi Alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Angin						Kapanewon Girisubo, Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Pengembangan Prasarana Sumberdaya Energi Alternatif Pembangkit Listrik Lainnya Berupa Pengembangan Energi Gelombang						Kapanewon Saptosari	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan kelompok pengelola air mandiri						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
		Pemberdayaan POKDARWIS						Seluruh Obyek wisata	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		Pengkajian						Kapanewon	perangkat

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		terkait pengganti komoditas pohon jati yang dinilai sudah tidak ekonomis untuk dikembangkan di wilayah SRS Pansela Gunungkidul.						Girisubo	daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
4.	Penguatan satuan gugus tugas bencana, khususnya di kawasan berpotensi terjadi bencana	Pembentukan POKMAS IPL Komunal						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penerapan teknologi ramah						Kapenewon Tanjungsari	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		lingkungan.							
		Pengembangan pengelolaan sampah berbasis kelompok utamanya kalurahan dengan dasar 3R tanpa adanya pembangunan TPA.						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
5.	Pengembangan destana/kaltana berbasis kearifan lokal	Integrasi Destana, Kalurahan Deswita (desawisata, Kalurahan Proklam, Kampung Siaga Bencana, dan Kalurahan Maritim sebagai upaya pengurangan risiko bencana						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengalokasian anggaran dana kalurahan untuk penanggulangan bencana						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa
		Penanganan kejadian bencana pada level kalurahan						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa
		Desentralisasi PRB pada tingkat kalurahan						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									masyarakat dan Desa
		pengembangan tata kelola yang baik sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam mengelola risiko perubahan iklim						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa
		Membangun Kapasitas Adaptif terhadap Ketidakpastian Masa Depan						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinsos, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		Gladi dan simulasi						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		menghadapi bencana pada level kalurahan							melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Pemerintah Kalurahan
6.	Optimalisasi perlindungan terhadap kelompok rentan	Penyediaan data terpilah gender sesuai dengan kebutuhan						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial P3A, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang adminstrasi kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kalurahan
		Pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		Memberikan akses yang aman dan adil							perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keten teraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial P3A, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang adminstrasi kependudukan dan catatan sipil, Pemerintah Kalurahan
		Pendataan jumlah wisatawan yang masukdan keluar wilayah pariwisata yang dilaporkan setiap bulannya untuk mengetahui tren jumlah wisatawan.						Seluruh Objek Wisata	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		Pendataan jumlah pelaku usaha yang tidak menetap di wilayah SRS Pansela.						Seluruh wilayah SRS	Pemerintah Kalurahan
7.	Penguatan kapasitas kebencanaan bagi masyarakat di sekitar SRS Pansela	Peningkatan jaringan jalan sesuai standar fungsi evakuasi bencana						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		Perencanaan jalur evakuasi bencana						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Kapenewon, Kalurahan
		Penyediaan tempat evakuasi sementara dan evakuasi akhir						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Kapenewon, Kalurahan
		Uji simulasi kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan uji coba peralatan serta rambu-rambu yang dipasang.						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Kapenewon, Kalurahan
		Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung secara						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		terbatas							hidup, Kapenewon, Kalurahan
		Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penanganan darurat bencana						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Kapenewon, Kalurahan
		Sosialisasi penyebaran informasi terkait pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul terutama di kawasan SRS Pansela yang memiliki potensi bencana dengan risiko kelas tinggi.						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Kapanewon, Kalurahan
		Pengembangan program kampung iklim di kalurahan sekitar sempadan pantai.						Girijati, Giricahyo, Giripurwo Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro,Planjan Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo Sidorehi, Tepus, Purwodadi Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									bidang lingkungan hidup, Kapanewon dan Kalurahan
		Sosialisasi dan edukasi pengelolaan lumbung sosial sebagai penyangga logistik saat terjadinya bencana.						Seluruh kalurahan di wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Kapanewon, Kalurahan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial P3A
8.	Pemulihan fungsi ruang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang	Pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan terutama pada kawasan kritis						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Penetapan dan pengukuhan batas hutan lindung						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengkajian terkait hubungan perubahan alih fungsi lahan dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana dan terjadinya bencana yang sebelumnya						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perangkat daerah yang melaksanakan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		belum pernah terjadi							urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan pantai						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
		Pencegahan dan pengendalian kegiatan di kawasan hutan lindung						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Preservasi dan konservasi hutan lindung						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan lindung						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengawasan dan pemantauan hutan secara berkala dan berkesinambungan						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									lingkungan hidup
		Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung secara terbatas						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Inventarisasi dan perlindungan mata air						Kapanewon Girisubo, Panggang, Purwosari, Saptosari, Tanjungsari, dan Tepus	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
9.	Penertiban pemanfaatan ruang non-formal	Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan pantai						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Pengendalian konversi lahan pertanian ke non-pertanian						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
		Perkuatan penegakan hukum pelanggaran tata ruang di wilayah sempadan pantai SRS Pansela Gunungkidul.						Girijati, Giricahyo, Giripurwo, Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidorehi, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
10	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai	Penyusunan regulasi pemanfaatan						Di daerah tangkapan air dan di sekitar	Perangkat daerah yang melaksanakan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
	arahan pemanfaatan ruang	lahan pada resapan air						sumber air	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Penetapan batas Wilayah Usaha Pertambangan						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Sosialisasi pertambangan ramah lingkungan						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang dan galian pembangunan						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Pengendalian dan optimalisasi kegiatan reklamasi pasca tambang						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Pengendalian pertambangan						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang,

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
11	Pengendalian kawasan perlindungan setempat secara optimal.	Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan perlindungan setempat						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan perlindungan setempat						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Pembuatan RTH fungsi tertentu pada kawasan sempadan sungai						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Penyelerasan regulasi tata ruang sepadan pantai dengan penanganan risiko bencana.						Girijati, Giricahyo, Giripurwo, Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidorehi, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Edukasi terkait						Girijati,	perangkat

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		regulasi tata ruang dan potensi bencana di sepanjang pantai khususnya kepada para pedagang.						Giricahyo, Giripurwo, Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidorehi, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu	daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan
		Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan sungai						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan pantai						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		regulasi tata ruang dan potensi bencana di sepanjang pantai khususnya kepada para pedagang.						Giricahyo, Giripurwo, Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidorehi, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu	daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
		Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan sungai						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan pantai						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									bidang kesatuan bangsa dan politik
		Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan waduk, embung, dan telaga						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
12	Penguatan investasi bidang pariwisata berbasis risiko bencana yang ada di wilayah tersebut	Pembangunan hidran dan sumber air pemadam kebakaran (<i>fire water resources</i>)						Kapanewon Girisubo, Panggang, Purwosari, Saptosari, Tanjungsari, dan Tepus	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Penetapan dan						Seluruh	Perangkat

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		pengelolaan kawasan Geosite						wilayah SRS	daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Perlindungan Geosite bagian Utara						Panggang	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Perlindungan Geosite bagian selatan						Tepus, Girisubo, Tanjungsari	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									pekerjaan umum
		Pengembangan riset dan wisata minat khusus						Tepus, Girisubo, Tanjungsari	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
13	Optimalisasi pengelolaan lingkungan di kawasan rawan bencana	Penerapan sistem tebang pilih						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan hutan produksi						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Penyiapan dan pemasangan sistem peringatan dini (<i>early warning</i>) dengan konsep keterlibatan masyarakat						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keten teraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
									kebakaran
		Penyederhanaan alur perijinan terkait pembukaan lahan guna TPS3R di wilayah SRS Pansela Gunungkidul dengan tetap menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pembentukan dan pengembangan budaya memilah dan mengolah sampah di masyarakat tingkat kalurahan						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengadaan dan penyebaran tempat sampah yang dipisahkan jenisnya di lokasi-lokasi wisata dengan himbauan kepada wisatawan agar membuang sampah pada tempatnya.						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pemberian sanksi bagi masyarakat dan wisatawan yang membuang sampah tidak pada tempatnya.						Seluruh Wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
14	Pengelolaan kawasan suaka	Perencanaan dan penetapan						Saptosari	perangkat daerah yang

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
	alam, pelestarian alam dan cagar budaya dengan pelestarian habitat dan ekosistem khusus dengan konsep berkelanjutan.	perlindungan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa monyet ekor panjang							menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Perencanaan dan penetapan perlindungan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa pendaratan dan pengembangbiakan penyu						Panggang, Saptosari, Tepus, Girisubo	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang
		Perencanaan dan penetapan perlindungan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa burung walet						Panggang, Girisubo	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Perencanaan dan penetapan perlindungan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa khas goa						Panggang, Saptosari, Rongkop	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengembangan ekosistem dan rantai makanan						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		monyet ekor panjang							an urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengkajian terkait perilaku monyet ekor panjang dan penyusunan upaya pengendalian populasi serta perbaikan ekosistem berkelanjutan.						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Peninjauan kembali legalitas dalam pengurangan populasi monyet ekor panjang di Indonesia sebagai satwa dilindungi.						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengendalian populasi monyet ekor panjang yang sesuai dengan peraturan						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengecualian terhadap legalitas penanganan populasi monyet ekor panjang (dibunuh) terhadap kondisi luar biasa yang telah meresahkan hingga merugikan masyarakat di wilayah SRS Pansela.						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Rehabilitasi dan preservasi Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa						Saptosari	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
15	Peningkatan pemahaman risiko berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal	Konservasi bangunan cagar budaya						Seluruh Wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
		Pengendalian pembangunan perumahan baru						Seluruh Wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
		Pemerataan dan peningkatan terhadap akses pendidikan						Seluruh Wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		Penambahan kurikulum pengelolaan sampah sebagai salah satu kurikulum muatan lokal di seluruh sektor pendidikan dari yang terendah (PAUD-SMA), sehingga akan terbentuk kesadaran terkait dengan pengelolaan sampah dari						Seluruh wilayah SRS	Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

No	Strategi	Aksi Mitigasi	Tahun Anggaran					Lokasi	Pelaksana
			1	2	3	4	5		
		individu masing-masing.							
		Pengkajian terkait hubungan antara perubahan alih fungsi lahan dengan menurunnya tingkat kesuburan lahan di sekitarnya di wilayah SRS Pansela.						Seluruh wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Pengkajian terkait dampak perubahan iklim terhadap frekuensi kejadian bencana di wilayah sempadan pantai SRS Pansela						Seluruh Wilayah SRS	perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

Sumber: *Forum Group Discussion* dan Hasil Analisis, 2023

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian target-target pelaksanaan penanganan risiko bencana di wilayah satuan ruang strategis pantai selatan di Kabupaten Gunungkidul dari waktu ke waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi . Kontribusi organisasi non-pemerintah (organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi) pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanganan Risiko Bencana di Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul.

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral dalam penanganan risiko bencana sebagai instrumen kontrol kinerja penanganan risiko bencana yang dilakukan. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kemajuan upaya yang telah dilakukan. Dari identifikasi aspek- aspek yang menjadi kendala atau faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut selanjutnya dianalisis dan dirumuskan langkah-langkah solusi maupun poin-poin rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan selanjutnya.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian target-target pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian upaya mitigasi dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi, kebijakan, serta pengemasan pelaksanaan program. Kerangka pemantauan dan evaluasi lebih lanjut ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

Waktu	Materi/Pemantauan Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan / Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase pencapaian	Forum lintas sektor
Per Tahun	Pemaduan para pihak		Forum lintas sektor
	Pemaduan perencanaan lainnya		
	Pencapaian hasil		
Tengah Periode	Review	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian sasaran	Rencana tindak lanjut	
Akhir Periode	Pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian tujuan	Rencana tindak lanjut	
		Pembelajaran	

BAB VII PENUTUP

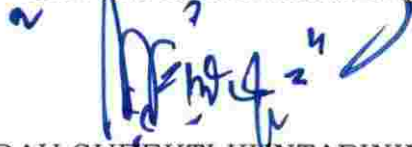
Rencana Penanganan Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk menyusun rumusan masalah dan isu strategis wilayah Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul serta menyusun Rencana Aksi Upaya Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dilengkapi dengan waktu dan dukungan pemangku kepentingan yang diharapkan. Penyusunan dokumen ini guna memberikan rancangan arah dan rencana aksi untuk mewujudkan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Dalam Dokumen Rencana Penanganan Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS PANSELA) Kabupaten Gunungkidul tersaji pemaparan kondisi kebencanaan di wilayah tersebut. Dimana terdapat 7 (tujuh) potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah ini. Ketujuh bencana tersebut adalah cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami. Adanya potensi bencana ini tentunya akan memberikan potensi dampak baik berupa sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan yang tertuang dalam kerentanan. Pengarusutamaan antara penanganan bencana dengan pembangunan daerah SRS PANSELA yang juga merupakan daerah pariwisata menjadi sebuah urgensi yang harus segera dilaksanakan.

Analisis terkait isu-isu strategis kawasan SRS PANSELA dan upaya penanganan serta potensi sumberdaya dan tantangannya dilakukan pengolahan melalui metode SWOT dan AHP. Metode SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sisi terbaik yang dapat diambil guna menyusun program penanganan kebencanaan di kawasan SRS PANSELA. Adapun metode AHP dilakukan guna menggali prioritas program penanganan kebencanaan berdasarkan dari pendapat para ahli (dalam hal ini adalah pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul) mengenai upaya penanganan bencana yang dapat dilakukan di wilayahnya khususnya wilayah SRS PANSELA.

Berdasarkan hal tersebut maka Penyusunan Rencana Penanganan Risiko Bencana SRS Pantai Selatan Gunungkidul dapat menjadi upaya untuk mewujudkan *resilience* berkelanjutan dalam mengurangi risiko bencana jangka panjang. Selain itu dokumen ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan di wilayah SRS Pantai Selatan Gunungkidul khususnya.

BUPATI GUNUNGKIDUL,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH